



LAPORAN KINERJA (LKJ) 2018

Industrialis di era
Making Indonesia 4.0
"IKM GO DIGITAL"



Kopi LIBERIKA
TUNGKAL
JAMBI



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**

Kata Pengantar

Tahun 2018 merupakan langkah awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Langkah pertama seringkali yang tersulit tetapi juga yang terpenting. Maka keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan RPJMD Provinsi Jambi pada tahun 2018 akan menentukan arah pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi atas target kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2018 ini berisi analisis perbandingan antara sasaran dan realisasi indikator kinerja keluaran dan keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Berbagai permasalahan dan upaya tindak lanjut yang dilakukan selama pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 kemudian dievaluasi sebagai umpan balik bagi perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Laporan ini diarahkan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di seluruh unit kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.

Jambi, Januari 2018

KEPALA DINAS,

Drs. ARIANSYAH, ME
PEMBINAUTAMA MADYA
NIP.19720630 199302 1001

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Dinas Perindag Provinsi Jambi	3
1.5. Peran Strategis Dinas Perindag Provinsi Jambi	10
1.6. Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi	13
1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1. RPJ MD Provinsi Jambi 2016-2021	19
2.2. Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi 2016-2021	22
2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perindag Provinsi Jambi 2017	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	45
3.2. Realisasi Anggaran	89
BAB IV PENUTUP	95
4.1. Kesimpulan	95
4.2. Permasalahan dan Kendala	96
4.3. Rekomendasi	97
LAMPIRAN	

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perindag Provinsi Jambi	5
Gambar 2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perindag Provinsi Jambi 2016-2021	31
Gambar 2.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Program	36

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindag Provinsi Jambi 2016-2021	32
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Menengah Dinas Perindag Provinsi Jambi 2016-2021	37
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perindag Provinsi Jambi 2016	41
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel 3.2. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindag Provinsi Jambi 2018	47
Tabel 3.3. Sasaran Strategis 1	48
Tabel 3.4. Peran Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB 2011 - 2013 (persen)	52
Tabel 3.5. Peran Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB 2014 - 2018(persen)	52
Tabel 3.6. Sasaran Strategis 2	72
Tabel 3.8. Sasaran Strategis 3	77
Tabel 3.9. Sasaran Strategis 4	86
Tabel 3.11. Penerimaan PAD Dinas Perindag Provinsi Jambi 2016	90
Tabel 3.12. Perkembangan PAD dari jasa Pelayanan Pengujian Mutu UPTD BPSMB dan Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi 2012-2016	90
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2018	91
Tabel 3.14. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2018	93

Daftar Grafik

		Halaman
Grafik 1.1.	Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi Menurut Jenis Kelamin dan Unit Kerja	13
Grafik1.2.	Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi Menurut Tingkat Pendidikan	13
Grafik1.3.	Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi Menurut Golongan dan Unit Kerja	14
Grafik1.4.	Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi Menurut Jabatan	15
Grafik1.5.	Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi Menurut Usia	15
Grafik1.6.	Keragaan SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi Menurut Diklat Struktural	16
Grafik 3.1.	Tingkat Capaian IKU SDM Dinas Perindag Provinsi Jambi 2018	49
Grafik 3.2.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi 2010-2018	51
Grafik 3.3.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi dibanding Nasional 2011-2018	52
Grafik 3.4.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Jambi 2010-2017	55
Grafik 3.5.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi dsbanding Nasional 2010-2017	56
Grafik 3.6.	Perkembangan Usaha Industri Provinsi Jambi 2012- 2018	59
Grafik 3.7.	Perkembangan Tenaga Kerja Industri Provinsi Jambi 2012-2018	61
Grafik 3.8.	Kontribusi Sektor Perdagangan Provinsi Jambi 2010-2016	68
Grafik 3.9.	Kontribusi Sektor Perdagangan Provinsi Jambi disbanding Nasional 2011-2018	69
Grafik 3.10.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Jambi 2010-2018	72
Grafik 3.11.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Jambi dibanding Nasional 2010-2018	73

Grafik 3.12.	Perkembangan Usaha Perdagangan Provinsi Jambi 2020-2016	74
Grafik 3.13.	Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Jambi 2011-2018	79
Grafik 3.14.	Struktur Nilai Ekspor Menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi	80
Grafik 3.15.	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi 2011-2017	83
Grafik 3.16.	Perkembangan PAD dari Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2012-2018	90
Grafik 3.17.	Perkembangan Penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor tahun 2012-2018	90

IkhtisarEksekutif

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam pembangunan industri dan perdagangan adalah membangun daya saing yang bernilai tambah dan berkelanjutan di pasar lokal dan global. Penilaian capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2012-2018 dapat dilihat dari kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap ekonomi daerah, Kontribusi tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi. Walaupun pertumbuhan ekonomi global cenderung mengalami penurunan dan berpotensi menciptakan instabilitas perekonomian daerah dan nasional, namun kinerja sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian daerah relatif tetap stabil bahkan di beberapa domain mengalami perkembangan positif.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan Misi Keempat dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yaitu *Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan*. Untuk itu, seluruh program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016-2021, Rencana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi secara konsisten, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi merupakan sarana pemantauan kinerja secara periodik berdasarkan dari realisasi indikator kinerja selama 1 (satu) tahun berjalan. Pada tahun 2018, secara keseluruhan terdapat 11 indikator kinerja dari 4 sasaran strategis yang diukur.

Dari keseluruhan 11 Indikator Kinerja (IK), sebanyak 8 IK telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu

diatas 91%.Sedangkan, 3 IK lainnya memiliki capaian sebesar 82,01%, 82,01 % dan 58,6%.Dalam mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang muncul selama tahun 2018diperlukanupaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah dengan mempertimbangkan sejumlah analisa yang mempengaruhinya sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pada akhir tahun anggaran.

Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	10,80 %	10,76 % *	99,6
		Pertumbuhan sektor Industri (%)	2,71 %	3,02 % *	111
		Persentase peningkatan usaha industri (%)	5,02 %	4,12 %	82,1
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri (%)	4,12 %	5, 02 %	82,1
2.	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	12,55 %	12,23 % *	97,45
		Pertumbuhan sektor perdagangan (%)	6,50 %	6,91 % *	94,1
		Persentase peningkatan usaha perdagangan (%)	7,0 %	6,98 %	99,71
3.	Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor	Persentase nilai ekspor non migas (%)	10,0 %	5,86 % **	58,6
		Persentase nilai impor (%)	5,0 %	19,52 % *	390,4
4.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP (%)	75 %	75 %	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa (%)	75,0 %	74,67 %	99,56

Keterangan :

1. Penanggung jawab data untuk Sasaran Strategis 1 yaitu Bidang Industri Kecil dan Kerajinan serta Bidang Industri Menengah dan Besar.
2. Penanggung jawab data untuk Sasaran Strategis 2 yaitu Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan UPTD Metrologi
3. Penanggung jawab data untuk Sasaran Strategis 3 yaitu Bidang Perdagangan Luar Negeri dan UPTD BPSMB.
4. Penanggung jawab data untuk Sasaran Strategis 4 yaitu Sekretariat, UPTD BPSMB dan UPTD Metrologi

BAB 1

Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Disperindag Provinsi J a m b i
- 1.5. Peran Strategis Disperindag Provinsi J a m b i
- 1.6. Keragaman SDM Disperindag Provinsi J a m b i
- 1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

" ! ")
0% \$! (5, 5 ! .

I.I. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana di dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja.

Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran oleh setiap instansi pemerintah guna mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakholders* demi perbaikan kinerja Disperindag, maka disusunlah laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambitahun 2018.

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018 antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2018 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama Tahun 2018. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

I.4. Gambaran Umum Dinas Perindag Provinsi Jambi

Pembentukan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut :

1.4.1. Tugas

Berdasarkan Bab II, Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas, *“melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2010 tentang Perdagangan, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 47 Tahun 2016, dan kebijakan Gubernur Jambi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”*

1.4.2. Fungsi

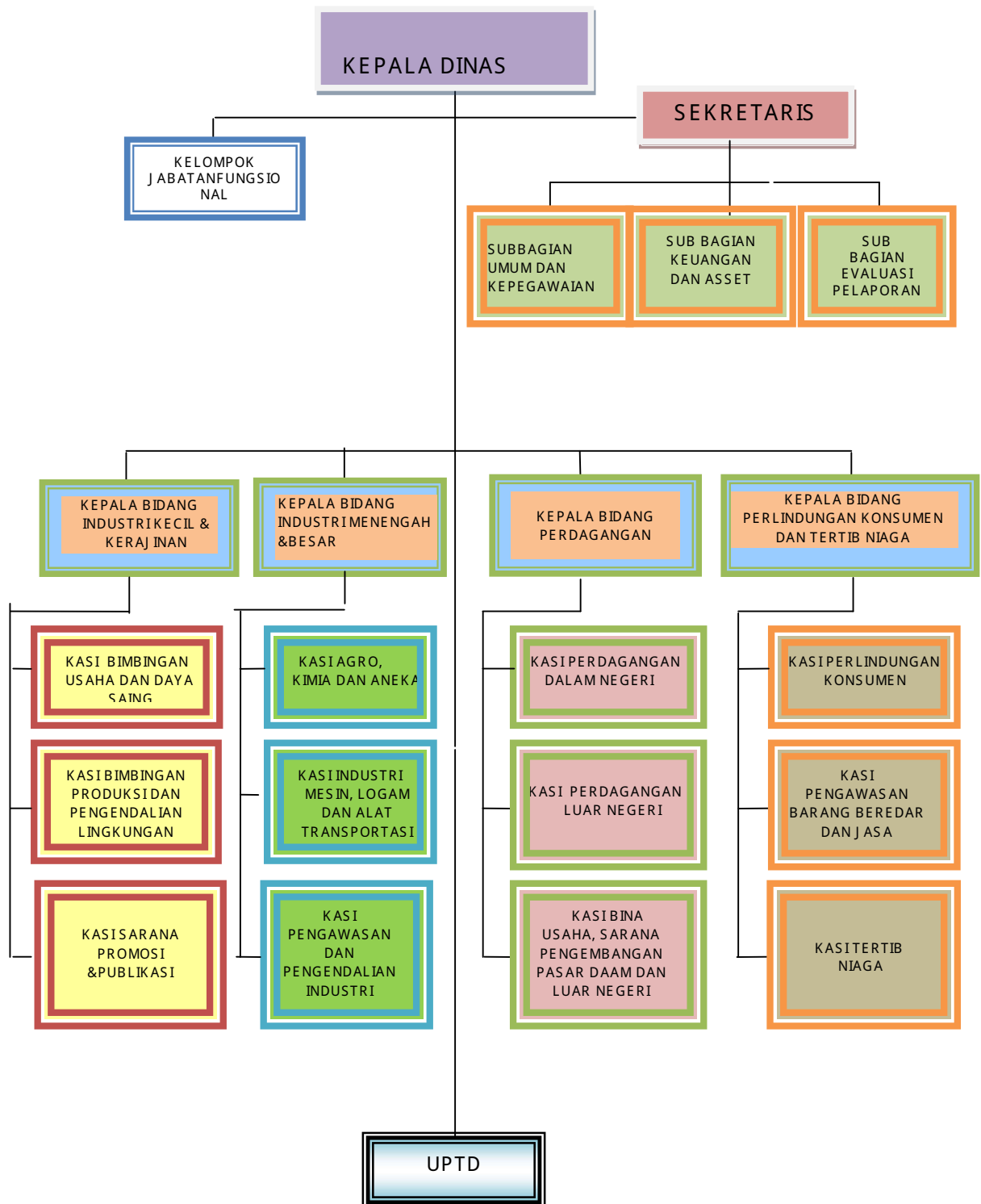
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

1.4.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdiri dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III terdiri dari 1 sekretariat, 4 Bidang yang menangani Industri dan perdagangan, 1 UPTD, dan kelompok jabatan fungsional. Adapun bagan organisasinya sbb :

{ ¢w- Y ¢- whwD! bL! {L5L t 9wb5! D twh¹ lb{LWa . L



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas .

Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sebagaimana Pasal 6, Sekretariat membunyai tugas membantu dinas dalam rangka merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun pihak-pihak terkait. Sedangkan fungsinya sesuai dengan Pasal 7 antara lain :

- a. Melaksanakan koordinasi kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi,
- b. Menyelenggarakan petunjuk pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung di lingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Usaha dan daya Saing
- b. Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan
- c. Seksi Sarana Promosi dan Publikasi

Sebagaimana Pasal 14, Bidang Industri Kecil dan Kerajinan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, teknologi pemasaran/permodalan, kemitraan, promosi pemasaran Industri Kecil dan

Kerajinan serta memfasilitasi kemudahan Investasi Industri, analisa iklim usaha pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri. Sedangkan fungsinya sesuai dengan Pasal 15 antara lain :

- a. Penyusunan juknis bimbingan pembinaan dan pengendalian industri;
- b. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis teknologi(proses produksi), pemasaran, modall peralatan dan kemitraan;
- c. Pelaksanaan fasiltasi promosi Pameran Dalam Negeri dan Luar Negeri, sinergi dengan program instansi terkait;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan pengurusan investasi industri, kemudahan perolehan modal dengan mitra usaha industri /dagang;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan;
- f. Pelaksanaan sosialisasikan kebijakan teknis dan peraturan Perundangan-undangan Bidang Industri;
- g. Kerjasama dengan bidang lain untuk penembangan industri.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Industri Menengah dan Besar terdiri dari :.

- a. Seksi Agro, Kimia dan Aneka
- b. Seksi Industri Mesin, Logam dan Alat Transportasi
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri

Sebagaimana Pasal 22, Bidang Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan pemantauan, pengawasan dan pengendalian industri termasuk pengendalian lingkungan serta evaluasi kebijakan teknis di bidang industri Menengah dan Besar, sedangkan fungsinya sesuai dengan Pasal 23 antara lain :

- a. Penyusunan perencanaan dibidang industri dan menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha dibidang industri menengah dan besar;
 - b. Pengkoordinasian pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri menengah dan besar;
 - c. Pengkoordinasian bahan pembinaan dibidang industri menengah dan besar;
 - d. Pengkoordinasian menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri menengah dan besar;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi publikasi di dalam dan luar negeri dengan program instansi terkait;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Perdagangan terdiri dari :
- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - c. Seksi Bina Usaha Sarana, Pengembangan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Sebagaimana Pasal 30, Bidang Perdagangan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kebijakan teknis perdagangan meliputi pembinaan dan pelaksanaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri meliputi pengendalian stabilisasi bahan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, memperkecil ketergantungan pada impor, bina usaha dan sarana perdagangan dan pencitraan cinta produk dalam negeri. sedangkan fungsinya sesuai dengan Pasal 31 antara lain :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang bahan pokok dan bahan penting, bahan berbahaya (b2), minuman beralkohol (minol) perdagangan gula antar pulau terdaftar (pgapt), pusat distribusi regional dan provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang pengembangan ekspor dan meperkecil ketergantungan pada produk impor dan

pembinaan terhadap pelaku usaha yang berpeluang ekspor dan eksportir potensial;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang bina usaha dan sarana perdagangan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Konsumen
 - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - c. Seksi Tertib Niaga

Sebagaimana Pasal 38, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niagamempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasaran serta pengendalian distribusi barang, sedangkan fungsinya sesuai dengan Pasal 39 antara lain :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasaran;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan pelaksanaan analisa kasus perlindungan konsumen dan perdagangan, bimbingan operasional, petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ), petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG)
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penegakan hukum perlindungan konsumen, penegakan hukum perizinan dibidang perdagangan, penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasaran;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
- UPTD tersebut diatas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jambi. Berdasarkan Perda tersebut, UPTD BPSMB mempunyai *tugas pokok* yaitu *melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perindag Provinsi Jambi dibidang pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada pada produsen, eksportir dan dunia usaha lainnya.*
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- Sebagaimana Pasal 48, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing. Di Dinas Perindag Provinsi Jambi mempunyai 2 kelompok jabatan fungsional antara lain :
- Kelompok Jabatan Fungsional Industri Kecil dan Kerajinan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Mutu Barang

1.5. Peran Strategis Dinas Perindag Provinsi Jambi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan industri dan Perdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas, *melakukan secara lebih aplikatif, antara lain :*

- Mendorong pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar berbasis kompetensi daerah
- Pengembangan sentra-sentra produksi industri kecil di pedesaan

3. Pertumbuhan kawasan industri Wilayah Timur Provinsi Jambi.
4. Mendukung pelaksanaan program revitalisasi pertanian dan UKM dalam mengentaskan kemiskinan.
5. Mendorong pengembangan usaha perdagangan yang efisien, berdaya saing dan berorientasi pasar ekspor.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi antara lain :

1. Masih kurang frekuensi kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan didukung pendanaan yang memadai.
2. Masih kurangnya bantuan peralatan produksi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk hasil industri.
3. Masih kurangnya pengetahuan para pengusaha dalam mematuhi etika bisnis, serta kewajiban melaporkan jika terjadi penutupan usaha, kepindahan lokasi kegiatan usahanya diluar wilayah kerja.
4. Jaminan ketersediaan sembilan bahan pokok di pasaran belum maksimal.
5. Masih kurangnya ketersediaan sarana perdagangan yang lebih representatif untuk kelancaran distribusi barang dan jasa.
6. Tenaga Teknis penguji mutu barang (PMB) penguji dan kalibrasi dalam 3 tahun terakhir sudah banyak yang memasuki masa purna tugas/pensiun, sedangkan penggantian masih terbatas/sedikit sehingga tidak sesuai dengan beban tugas yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :

1. Menugaskan staf untuk mengikuti diklat dan bimtek secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM.
2. Memperluas kemitraan dalam bentuk kerjasama antara industri dan lembaga keuangan perbankan dan non bank serta Pembangunan/pengembangan kawasan industri di ujung jabung perlu segera terwujud agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.

3. Meningkatkan sosialisasi kepada pengusaha dalam rangka tertib niaga.
4. Penambahan frekuensi kegiatan operasi pasar dan pasar murah.
5. Melakukan pembangunan/renovasi pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Provinsi Jambi untuk menunjang kelancaran kegiatan perdagangan.
6. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi menambahkan SDM untuk tenaga pengujian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

I.6. Keragaman SDM Dinas Perindag Provinsi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dijalankan melalui 6 Unit Kerja, terdiri dari satu unit yang menangani sekretariat, 2 bidang Industri, 2 bidang Perdagangan dan didukung oleh 1 UPTD BPSMB.

Dari sisi sumber daya kepegawaian jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 128 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Perindag Provinsi Jambi sebanyak 109 orang
2. UPTD BPSMB sebanyak 19 orang

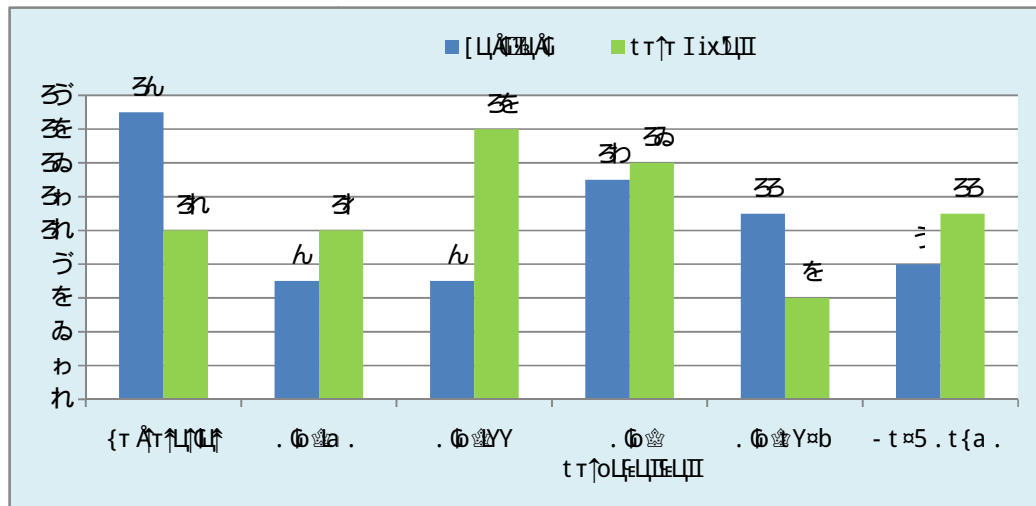
1. Keragaman SDM Menurut Jenis Kelamin dan Unit Kerja

Jumlah pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 128 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 60 orang atau 46,87% dan perempuan sebanyak 68 orang atau 53,12%. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tersebut tersebar pada 6 unit kerja Eselon III dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Sekretariat 27 orang, Bidang Industri Menengah dan Besar 17 orang, Bidang Industri Kecil dan Kerajinan 23 orang, Bidang Perdagangan 27 orang, dan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 17 Orang dan UPTD BPSMB 19 orang. Keragaman SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2018 menurut jenis kelamin dan unit kerja seperti pada grafik berikut:

Grafik 1.1.

Keragaman SDM Disperindag Provinsi Jambi
Menurut

Jenis Kelamin dan Unit Kerja



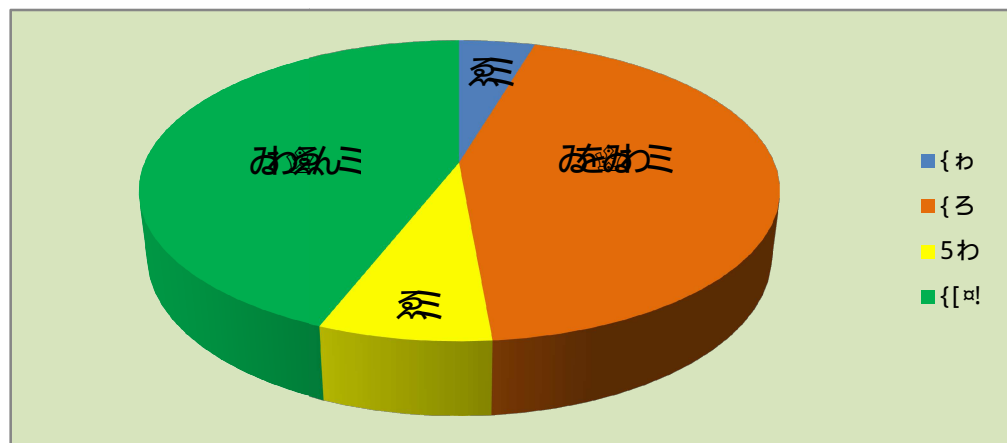
2. Keragaman SDM Menurut Tingkat Pendidikan

Disamping itu, komposisi jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : S2 sebanyak 5 orang atau 3,90%; S1 sebanyak 48 orang atau 37,5%; D3 sebanyak 8 orang atau 6,25%; SLTA sebanyak 48 orang atau 37,5%.

Grafik 1.2.

Keragaman SDM Disperindag Provinsi Jambi
Menurut

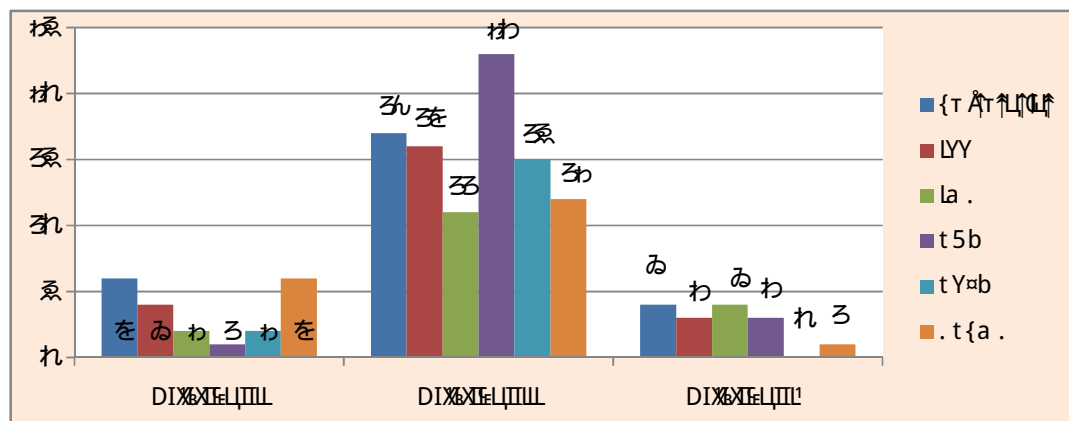
Tingkat Pendidikan



3. Keragaman SDM Menurut Golongan dan Unit Kerja

Sedangkan Keragaman Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2018 menurut golongan dan kepangkatan adalah sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 15 orang; Golongan III sebanyak 92 orang; Golongan II sebanyak 21 orang. Keragaman SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menurut golongan kepangkatan dan unit kerja Eselon III seperti pada grafik berikut :

Grafik 1.3. Keragaman SDM Disperindag Provinsi Jambi Menurut Golongan dan Unit Kerja

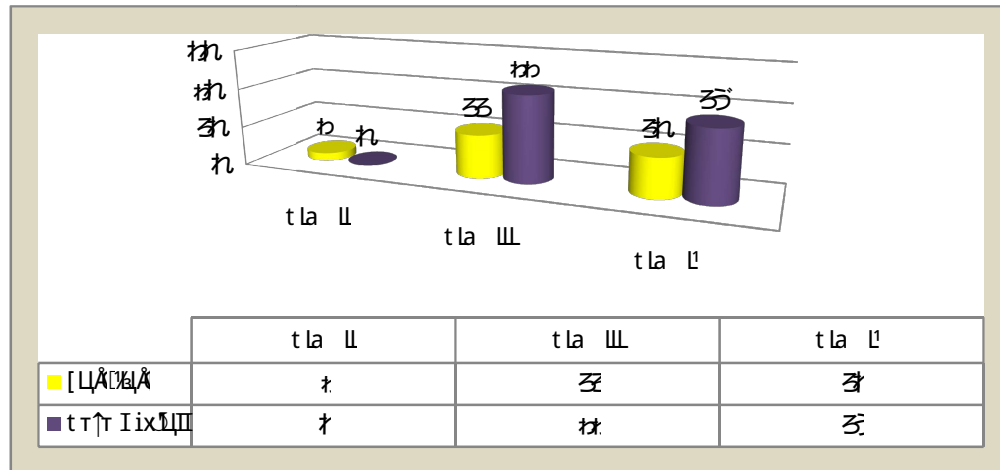


4. Keragaman SDM Menurut Jabatan

Dikarenakan institusi Dinas Perindag Provinsi Jambi merupakan institusi teknis yang mengharuskan latar belakang pendidikan tertentu maka pegawai laki-laki dan perempuan di Dinas Perindag Provinsi Jambi memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon III dan 8 (delapan) pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 4. Untuk jelasnya komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik berikut :

perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Grafik 1.6. Keragaman SDM Disperindag Provinsi Jambi Menurut Diklat Struktural



I.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Eksecutive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan,

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi inerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1. RPJ MD Provinsi J a m b i 2016-2021
- 2.2. Renstra Disperindag Provinsi J a m b i 2016-2021
- 2.3. Perjanjian Kinerja Disperindag Provinsi J a m b i 2018

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Jambi disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur Jambi yang tertuang dalam RPJMD tersebut. Adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 - 2021 yaitu :

‘Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera’
Wa . L^a- b^a! { *mb*

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tertib : diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih,

transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

- Unggul : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Adil : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Sejahtera : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya .

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut:

- Misi satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip - prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
- Misi dua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis .
- Misi tiga : Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
- Misi empat : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk - produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
- Misi lima : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah

Misi enam : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, menempatkan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan terutama untuk mendukung Misi 4 (empat) yaitu *‘Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan`*

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan Perindustrian, melalui program antara lain:
 - a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - b. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia.
 - c. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah
 - d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :
 - a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
 - b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
 - d. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

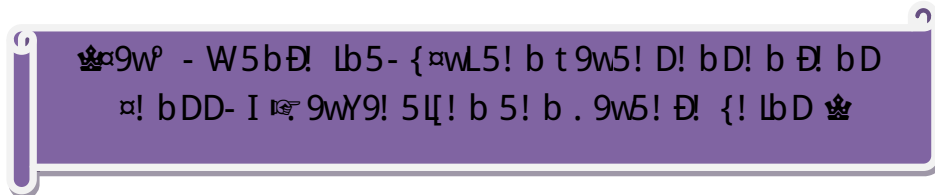
2.2. Renstra Disperindag Provinsi Jambi 2016 - 2021

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi beserta strategi yang akan

dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

A. VISI

Salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi yang terkait dengan pembangunan Industri dan Perdagangan adalah Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan. Untuk itu Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu:



B. MISI

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menetapkan 3 Misi yang akan diemban yaitu :

1. Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah
Pengembangan industri merupakan amanat pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan industri yang berbasis unggulan daerah diarahkan untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien. Untuk mendorong pertumbuhan industri di Jambi, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.
2. Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan Nusantara. Pembangunan perdagangan sangat penting

dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang sangat cukup berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Pembangunan perdagangan di Provinsi Jambi mempunyai tujuan antara lain :

2.1. Perdagangan Dalam Negeri

- a. Meningkatkan efesiensi perdagangan dalam negeri melalui sistem distribusi yang efisien dan efektif, dalam upaya meningkatkan daya saing produk - produk ekspor, mempertahankan tingkat harga yang wajar dan stabil di dalam negeri antara lain memperluas pemasaran barang - barang produk dalam negeri dan meningkatkan peranan pengusaha daerah khususnya pada golongan ekonomi lemah.
- b. Menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya disesuaikan dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat didukung oleh sistem pembiayaan dan jasa transportasi dan jaringan distribusi yang mantap

2.2. Perdagangan Luar Negeri

Mendorong ekspor komoditi non migas, dengan terus mengembangkan peningkatan daya saing penerobosan serta perluasan pasar luar negeri melalui peningkatan efesiensi produksi , mutu komoditi , jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganekaragaman produk dan pasar. Kegiatan ini didukung oleh penyempurnaan pemantapan sarana dan prasarana perdagangan , yang meliputi jaringan informasi pasar, peningkatan promosi serta peningkatan akses pasar.

3. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan

Salah satu perwujudan dari tugas pokok dan fungsi aparaturnegara adalah pelayanan publik. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan pemerintah

yang baik (good governance). Hal ini disebabkan karena salah satu tolak ukur penyelenggaraan good governance dapat dilihat dari terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan layanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian layanan baik berupa barang maupun jasa. Khususnya di bidang industri dan perdagangan.

C. TUJUAN

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2016-2021, serta menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Meningkatkan daya saing sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri dan selaras dengan misi pertama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah.

Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Jambi memberikan sumbangan paling besar pada total PDRB Jambi. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

2. Meningkatkan Stabilitas dan Penguatan Pangsa Pasar yang Terintegrasi dengan Pasar Dalam Negeri

Dengan penguatan pasar dalam negeri maka pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga dan akan terus menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Indikasi semakin kuatnya

pasar dalam negeri dapat dilihat dari peran Perdagangan Besar dan Eceran yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai upaya yang dilakukan dalam menguatkan pasar dalam negeri diantaranya dengan melakukan peningkatan layanan di sektor perdagangan.

3. Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.

Kegiatan ekspor dan impor dapat mempengaruhi neraca perdagangan. Keseimbangan yang positif dikenal sebagai surplus perdagangan jika terdiri dari ekspor lebih besar dari impor begitupun sebaliknya, Jika nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor maka keseimbangan akan negatif. Keadaan tersebut dikenal sebagai deficit perdagangan. Agar hal tersebut tidak terjadi maka pemerintah selalu berusaha mendorong melalui kebijakan ekspor dengan cara antara lain :

a. Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor

Diversifikasi ekspor merupakan penganeekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor.

b. Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi/bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah dan kemudahan dalam mengurus ekspor.

c. Insentif Ekspor

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor.

d. Meningkatkan Promosi Dagang ke Luar Negeri

Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri, misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal. Selain mendorong ekspor, pemerintah perlu juga mengendalikan impor. Agar tidak merugikan produk dalam negeri diperlukan adanya kebijakan impor untuk melindungi produk dalam negeri (proteksi) dengan cara berikut :

d.1. Pengenaan Bea Masuk

Barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat membeli barang impor dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor.

d.2. Kuota Impor

Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan dibatasinya jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran.

d.3. Substitusi Impor

Kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari luar negeri.

4. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha

Dalam mendukung Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menerapkan Standar Prosedur Operasi/*Standard Operating Procedures* (SOP) yang merupakan

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah.

D. SASARAN

Kondisi sektor industri dan perdagangan pada lima tahun yang akan datang tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada keinginan kuat untuk lebih meningkat peran industri terutama industri kecil dan menengah di semua cabang industri serta peran perdagangan. Untuk itu diharapkan terjadinya peningkatan peran industri dan perdagangan mulai tahun 2016 sampai tahun 2021.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan selama tahun 2016-2021 adalah sebanyak 4 sasaran yaitu :

1. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri

Tumbuh dan berkembangnya sektor industri selain sebagai sektor penggerak utama peningkatan nilai tambah komoditi primer utama Provinsi Jambi juga sebagai pendukung penggerak utama perekonomian daerah. Fasilitasi pengembangan, penyebaran dan penguatan daya saing industri daerah menjadi sasaran yang sangat penting dan krusial. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penumbuhan sektor industri khususnya penumbuhan wirausaha baru menjadi perhatian utama.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu :

- a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- b. Pertumbuhan sektor industri
- c. Persentase peningkatan usaha industri
- d. Persentase peningkatan tenaga kerja industry

2. Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri

Sistem distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien akan nyata berpengaruh pada daya saing produk dari sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran di dalam maupun diluar daerah. Untuk itu upaya-upaya dalam rangka mengendalikan inflansi, perluasan akses pasar produk baik produk industri maupun non industri dan pengembangan sarana perdagangan menjadi lebih krusial.

Pengamanan perdagangan juga dapat menjadikan instrument untuk mengembangkan ekonomi lokal. Tindakan pengamanan perdagangan perlu disenergikan dengan tindakan Aku Cinta Produk Lokal dan Gerakan Konsumen Cerdas akan memacu potensi ekonomi lokal menjadi pesat berkembang.

Adapun indikator kinerja sasaran yaitu :

- a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- b. Pertumbuhan sektor perdagangan
- c. Persentase peningkatan usaha perdagangan

3. Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor

Ekspor dan Impor merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB Provinsi Jambi. Aktivitas pengembangan ekspor daerah perlu digenjot guna untuk mengatasi defisit neraca perdagangan daerah yang dapat berpengaruh negatif pada perekonomian nasional khususnya daerah. Pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergis untuk mendorong ekspor komoditi unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian melalui pertambahan nilai ekspor.

Selanjutnya pengendalian impor perlu dilakukan untuk masuknya barang-barang konsumsi yang tidak layak dan berbahaya bagi konsumen juga kaitnanya dengan pengamanan produk-produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya produk serupa dari luar negeri yang masal dan kualitasnya tidak dapat terjamin. Pembinaan perdagangan lintas batas menjadi salah satu fokus lokasi pengembangan ekspor dan pengendalian

impor karena di daerah ini berbagai masalah berkaitan dengan perdagangan ilegal yang sering muncul. Pengendalian Impor dapat dikendalikan dengan instrumen penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan pemantauan masuknya barang-barang impor melalui koordinasi dengan instansi terkait. Pengembangan ekspor dan pengendalian impor di Provinsi Jambi harus didukung dengan institusi daerah yang memberikan pelayanan kepada dunia usaha terhadap pemberlakuan standarisasi dunia.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 2 yaitu :

1. Persentase peningkatan nilai ekspor non migas
2. Persentase penurunan nilai impor
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi adalah salah satu faktor pendukung pencapaian sasaran strategis lainnya. Pembinaan kemampuan dan kompetensi disiplin pegawai menjadi prioritas utama untuk mendapat hasil kinerja yang optimal. Disperindag Provinsi Jambi bersama dengan UPTD dibawahnya yang langsung bergerak pada pelayanan dunia usaha dan masyarakat harus didukung dengan peningkatan kompetensi aparatur yang profesional dan responsif terhadap dinamika di dunia usaha dan masyarakat. Tidak saja sistem manajemen kepegawaian yang baik, fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja harus disediakan termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas.

Hal lain yang tak kalah penting adalah perencanaan. Perencanaan kerja yang baik akan sangat membantu pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Demikian juga pengelolaan keuangan negara dimana pengelolaan keuangan negara yang baik dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan diperlukan

adanya monitoring dan evaluasi sehingga lebih tepat dan berdaya guna. Adapun indikator kinerja sasaran 4 yaitu :

1. Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa

Gambar 2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Disperindag Provinsi Jambi 2016-2021

M I S I	Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah	Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri			Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan
T U J U A N	Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah	Meningkatkan Stabilitas dan Penguatan Pangsa Pasar yang Terintegrasi dengan Pasar Dalam Negeri	Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha	
S A S A R A N	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor	Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi	

Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindag Provinsi Jambi 2016-2021
------------	---

V i s i:		Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Tangguh, Berkeadilan dan Berdaya Saing									
M i s i:		1. Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah 2. Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 3. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,05	11,50	11,60	10,80	10,90	11,00	11,10
			2	Pertumbuhan sektor Industri (%)	2,33	5,00	5,20	2,71	3,13	3,55	3,97
			3.	Persentase peningkatan usaha industri (%)	28.075 unit	5,00	5,20	5,02	5,22	5,42	5,62
			4	Persentase peningkatan tenaga kerja industri (%)	111.390 orang	4,00	4,20	4,12	4,32	4,52	4,72
2.	Meningkatkan stabilitas harga dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11,12	11,50	11,65	12,55	12,60	12,65	13,10
			2	Pertumbuhan sektor perdagangan (%)	11,02	11,50	11,60	6,50	6,65	6,80	7,0
			3	Persentase peningkatan usaha perdagangan (%)	85.357 unit	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas	Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalnya impor	1	Persentase nilai ekspor non migas (%)	US \$ 894,15 juta	10 ,00	10 ,00	6,14	6,28	6,42	10
			2	Persentase nilai impor (%)	US \$ 109,03 juta	5	5	5	5	5	5
4.	Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	1	Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP (%)	70%	75	80	85	90	95	100
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa (%)	74%	75	75,2	75,4	75,6	75,8	76

E. STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya, yaitu:

1. Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis bahan baku local.
2. Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan, sumber daya local yang berkelanjutan.
3. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
5. Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis.
6. Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru
7. Meningkatkan sistem perdagangan yang tertib niaga dan berdaya saing dalam rangka perlindungan konsumen.
8. Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor
9. Membangun jejaring sinergitas pembangunan industri dan perdagangan baik di pusat dan di daerah yang didukung dengan tersedianya data, SDM, sarana dan prasarana yang memadai

F. PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM PENUNJANG

PROGRAM PRIORITAS

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas akan dicapai melalui 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun ketujuh program tersebut adalah :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan meningkatkan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran.

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan disamping mendatangkan devisa bagi Negara.

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan yaitu untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

5. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor sesuai dengan SNI, produk ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global dan Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD).

6. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam pengembangan industri agro dan kimia.

7. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha - wirausaha IKM baru serta memperkuat kemampuan wirausaha IKM agar menjadi wirausaha yang mandiri dan professional.

PROGRAM PENUNJANG

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Dinas Perindag dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Sebagai indikator pencapaiannya tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan 🏰

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur pengadaan pakaian dinas untuk Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan agar terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya. Keluaran dari program ini adalah meningkatnya pengetahuan, wawasan dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Program ini bertujuan meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Keluaran dari program ini adalah Ketersediaan informasi tentang capaian atau realisasi kinerja Disperindag Provinsi Jambi.

Gambar 2.2. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Industri Agro dan Kimia ▣ Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatkan stabilitas harga dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas	Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri ▣ Pengembangan Standarisasi Nasional
Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana dan Prasarana - Peningkatan Disiplin Aparatur - Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD - Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ▣ Pengembangan Standarisasi Nasional

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah di selenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Disperindag Provinsi Jambi 2016-2021

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHB}}{\text{Total Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$ <p><i>ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku</i></p>	BPS	Bid. IKK dan IMB
	Pertumbuhan sektor Industri	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n)} - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}} \times 100\%$ <p>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHB : Atas Dasar Harga Konstan</p>	BPS	Bid. IKK dan IMB
	Persentase peningkatan usaha industri	$\frac{\text{Jumlah Usaha Industri Tahun (n)} - \text{Jumlah Usaha Industri Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Usaha Industri Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Hasil Pendataan	Bid. IKK dan IMB
	Persentase peningkatan tenaga kerja industri	$\frac{\text{Jumlah TK Industri Tahun (n)} - \text{Jumlah TK Industri Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah TK Industri Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Hasil Pendataan	Bid. IKK dan IMB
Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai Sektor Perdagangan PDRB ADHB}}{\text{Total Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$ <p><i>ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku</i></p>	BPS	Bid. PDN dan UPTD Metrologi
	Pertumbuhan sektor Perdagangan	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun (n)} - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun (n-1)}}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun (n-1)}} \times 100\%$ <p>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</p>	BPS	Bid. PDN dan UPTD Metrologi
	Persentase peningkatan usaha perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun (n)} - \text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Hasil Pendataan	Bid. PDN dan UPTD Metrologi
Meningkatnya ekspor daerah dan	Persentase nilai ekspor non migas	$\frac{\text{Nilai Ekspor Non Migas Tahun (n)} - \text{Nilai Ekspor Non Migas Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Ekspor Non Migas Tahun (n-1)}} \times 100\%$	BPS	Bid. PLN dan UPTD BPSMB

terkendalinya impor		Nilai Ekspor Non Migas Tahun (n-1)		
	Persentase nilai impor	$\frac{\text{Nilai Impor Tahun (n)} - \text{Nilai Impor Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Impor Tahun (n-1)}} \times 100\%$	BPS	Bid. PLN dan UPTD BPSMB
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan ksternal dan internal organisasi	Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP	$\frac{\text{Target layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP Tahun (n)} - \text{Realisasi layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP Tahun (n)}}{\text{Target layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP Tahun (n)}} \times 100\%$	Laporan Kinerja	Sekretariat
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa	Rata-rata Skor IKM atas beberapa pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas Perindag Provinsi Jambi kepada pelaku usaha	Hasil Survey IKM	UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB

2.3. Perjanjian Kinerja Disperindag Provinsi Jambi 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menyusun Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun

2018. Sepanjang tahun tersebut Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah dibuat sebanyak 2 kali yaitu pada Perjanjian Kinerja Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Murni Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Perubahan Tahun 2018.

Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang meliputi program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Disperindag Provinsi Jambi 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		Anggaran (Rp)
Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,09 %	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		2.661.814.000,00
	Pertumbuhan sektor Industri	3,13%	1.	Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah	89.810.000
	Persentase peningkatan usaha industri	5,22 %	2.	Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal	737.225.000
	Persentase peningkatan tenaga kerja industri	5,22 %	3.	Penguatan kelembagaan industri kecil	161.294.000
			4.	Pengembangan rumah tenun Jambi	258.300.000
			5.	Pendataan IKM se Provinsi Jambi	79.080.000
			6.	Pengembangan perajin unit promosi Jambi	365.400.000
			7.	Pengembangan desain berbasis budaya daerah	745.450.000
			8.	Pengembangan sentra usaha industri kecil	126.790.000
			9.	Koveksi gugus kendali mutu tingkat provinsi	98.465.000
			Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia		2.593.019.820,00
			1.	Pengawasan teknis pengembangan industri menengah dan besar	130.627.320
			2.	Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar	1.817.850.000
			3.	Peningkatan SDM Industri menengah dan besar	67.715.000
			4.	Partisi pada pemeran industri menengah dan besar	112.750.000
			5.	Updating industri menengah dan besar se provinsi Jambi	464.077.500
			Program Peningkatan Daya		281.093.500,00

			SaingKewirausahaan ndustri Kecil dan Menengah		
			1.	Pengembangan dan Pembinaan Wira Usaha Baru Industri Kecil	177.220.000
			2.	Pelatihan TOT bagi aparat pembina IKM	48.620.000
			3.	Pengembangan One Village Product (OVOP)	55.253.500
Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,60 %	ProgramPeningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		861.900.000,00
	Pertumbuhan sektor perdagangan	6,65 %	1.	Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang	188.400.000
	Persentase peningkatan usaha perdagangan	7,5 %	2.	Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri	323.000.000
			3.	Pendataan sarana perdagangan dan pedagang informal	43.300.000
			4.	Rantau pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	307.200.000
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		865.320.000,00
			1.	Pengawasan barang beredar dan jasa	206.320.000
			2.	Pengembangan dan Pembinaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	350.000.000
			3.	Monitoring barang yang kadarluarsa di pasaran	56.450.000
			4.	Sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen	136.300.000
Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalnya impor	Persentase nilai ekspor non migas	6,28 %	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri		179.500.000,00
	Persentase penurunan nilai impor	5.0 %	1.	Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri	27.500.000
			2.	Forum koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah	97.000.000
			3.	Pemuhtahiran data eksportir dan importir	55.000.000
			Program Pengembangan Standarisasi Nasional		822.027.000,00
			1.	Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi	95.400.000
			2.	Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor	227.950.000
			3.	Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi	53.500.000
			4.	Penambahan peralatan dan	363.252.000

				bahan uji serta perawatan Laboratorium	
			5.	Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB	44.225.000
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP	100 %		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.384.123.500,00
			1.	Penyediaan Jasa Surat-menyerurat	72.300.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa	75,6 %	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.000.000
			3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	191.998.000
			4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	113.356.000
			5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	93.863.000
			6.	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	32.500.000
			7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.902.000
			8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000
			9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.200.000
			10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.728.000
			11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	516.276.500
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.320.618.045
			1.	Pengadaan peralatan kantor	201.590.045
			2.	Pengadaan Meubeler	17.500.000
			3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	295.500.000
			4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	216.020.000
			5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	104.000.000
			6.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	444.420.000
			7.	Pengadaan komputer	41.588.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	194.400.000,00
			1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	194.400.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.130.000,00
			1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000
			2.	Pembinaan Jasmani dan Rohani	38.130.000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem	648.497.075,00

			Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
			1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	34.680.000
			2.	Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset	27.875.000
			3.	Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian	44.000.000
			4.	Penyusunan rencana kerja SKPD	199.815.000
			5.	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	97.822.075
			6.	Pengembangan sarana Informasi Yang Dapat Di Akses Masyarakat	244.305.000
			Program Pengembangan Standarisasi Nasional		37.700.000,00
			1.	Survei IKM Atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian	37.700.000
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan		29.900.000,00
			1.	Survey IKM Atas Pelayanan perlindungan konsumen	29.900.000

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan website Dinas Perindustrian dan Perdagangan nantinya menjadi pendorong fungsi pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Kriteria
1.	≥ 91	Sangat Baik	
2.	76 – 90	Baik	
3.	66 – 75	Sedang	
4.	51 – 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat rendah	

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1. Capaian IKU 2018

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/ 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tingkat Capaian Kinerja Disperindag Provinsi Jambi 2018

MISI 1					
Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah					
TUJ UAN 1					
Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah					
SASARAN 1					
Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri					
Indikator Kinerja	Kondisi 2017	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,19 %	10,80%	10,76 %	99,6	Sangat Baik
Pertumbuhan sektor industri	2,29 %	2,71 %	3,02 %	111	Sangat Baik
Persentase peningkatan usaha industri	28.075 Unit	5,02 %	4,12 %	82,1	Rendah
Persentase peningkatan tenaga kerja industri	111.390 Orang	4,12 %	5, 02 %	82,07	Sangat Baik

MISI 2					
Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri					
TUJ UAN 2					
Meningkatkan Stabilitas dan Penguatan Pangsa Pasar yang Terintegrasi dengan Pasar Dalam Negeri					
SASARAN 2					
Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri					
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,23 %	12,55 %	12,23 %	97,45	Rendah
Pertumbuhan sektor perdagangan	6,27 %	6,50 %	6,91 %	94,1	Rendah
Persentase peningkatan usaha perdagangan	85.357 Unit	7,00 %	6,98 %	99,1	Sangat Baik

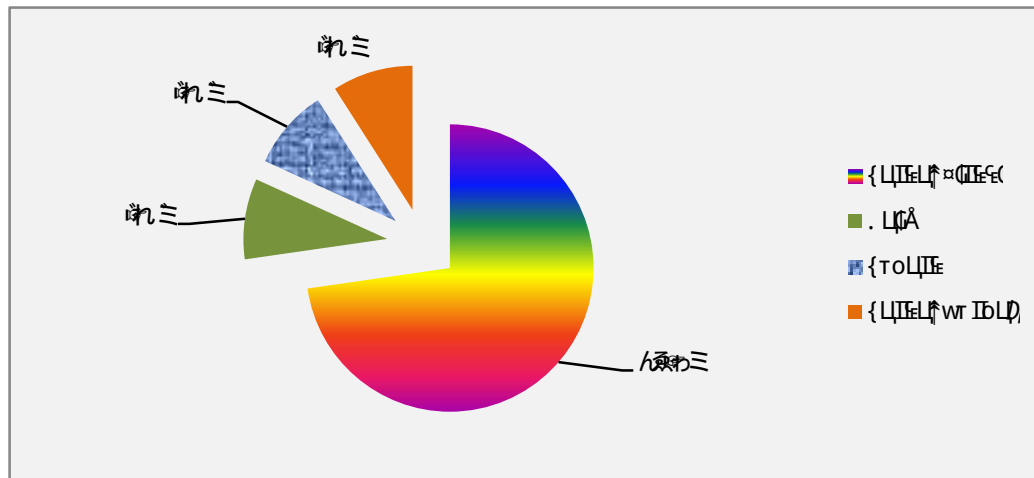
TUJ UAN 3					
Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas					
SASARAN 3					
Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor					
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase nilai ekspor non migas	US \$ 894,15 juta	10,0 %	5,86 %	58,60	Rendah
Persentase nilai impor	US \$ 109,03 juta	5,0 %	19,52 %	390,4	Sangat Baik

MISI 3 Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan					
TUJ UAN 4 Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha					
SASARAN 4 Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi					
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP	80,0 %	75 %	75 %	95,5	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa	75,2 %	75,0 %	74,67 %	99,56	Sangat Baik

Dari 11 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2018 sebagaimana tabel tersebut diatas, 8 indikator menunjukkan capaian diatas 91% . Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh unit kerja dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2018, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 9 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 2 indikator menunjukkan capaiannyarendah.

Grafik3.1. Tingkat Capaian IKU Disperindag Provinsi Jambi 2017



3.1.2. Analisa Capaian Kinerja 2017

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021, terdapat 3 (tiga) misi dan 3 (tiga) tujuan, serta 4 (empat) sasaran strategis, adapun analisa dari empat sasaran strategis untuk mencapai empat tujuan dan tiga misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, akan diuraikan sebagai berikut :

3.1.2.1. SASARAN STRATEGIS SATU

SASARAN STRATEGIS 1

Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari keempat Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Sasaran Strategis 1

MISI 1 Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah					
TUJUAN 1 Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah					
SASARAN 1 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri					
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2011	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,19 %	10,80 %	10,76 %	99,6	Sangat Baik
Pertumbuhan sektor industri	2,29 %	2,71 %	3,02 %	111	Sangat Baik
Persentase peningkatan usaha industri	28.075 Unit	5,02 %	4,12 %	82,1	Rendah
Persentase peningkatan tenaga kerja industri	111.390 Orang	4,12 %	5,02 %	82,07	Sangat Baik

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut

3.1.2.1.1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

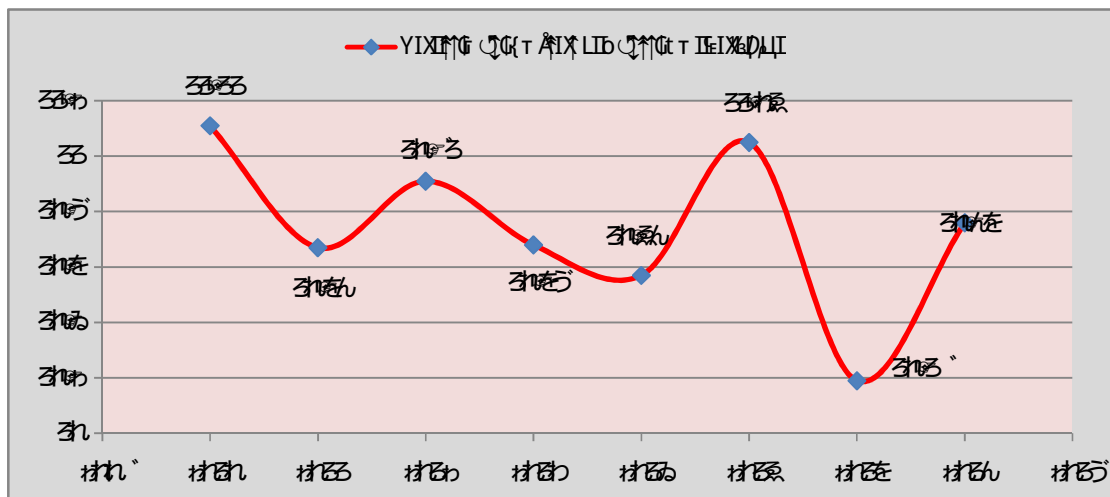
Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Daerah, diukur melalui penghitungan besaran persentase kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDRB sesuai dengan data BPS yang dikeluarkan.

Secara kumulatif nilai PDRB sektor industri pengolahan Provinsi Jambi tahun 2017 mencapai Rp 14.698 Triliun memberikan kontribusi sebesar 10,76 persen terhadap PDRB Provinsi Jambi yang mencapai nilai sebesar Rp 136.557 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 mencapai 11,05 persen. sehingga indikator kinerja satu pada sasaran strategis satu persentase capaiannya hanya sebesar 88,61persen bila dibandingkan dengan target sebesar 11,50 persen.

Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa Renstra yaitu tahun 2013 - 2017 mengalami kinerja yang berfluktuasi, dimana pada awal renstra tahun 2010 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 11,11 persen lalu menurun menjadi 10,67 persen pada tahun 2011 dan pada tahun

2012 kontribusi sektor industri pengolahan mengalami kenaikan kembali menjadi 10,91 persen dan selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 mengalami trend menurun menjadi 10,68 persen dan 10,57 persen namun pada tahun 2015 kembali menunjukkan kinerja yang mengembirakan menjadi 11,05 persen. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 10,19 persen. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 dari 10,19 persen menjadi 10,76 persen. Pada grafik 3.2. dapat dilihat kontribusi sektor industri pengolahan Provinsi Jambi sejak tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

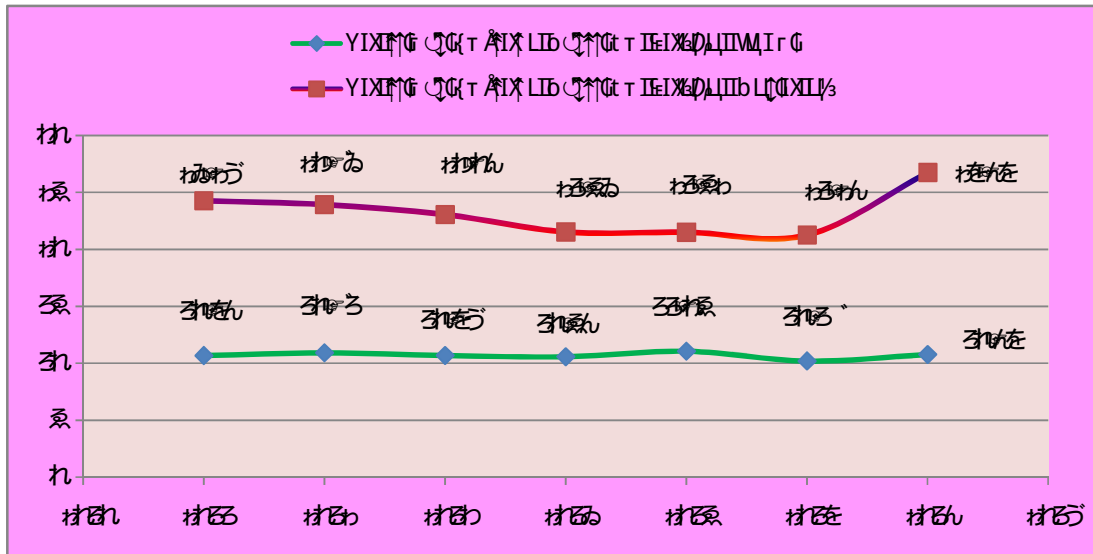
Grafik 3.2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi 2011-2017



Sumber : BPS Provinsi Jambi

Trend perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan Provinsi Jambi sejak tahun 2011-2017 selalu dibawah perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan nasional. Pada grafik 3.3. dapat dilihat perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan Provinsi Jambi dengan perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan nasional sebagai berikut :

Grafik 3.3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi dibanding Nasional 2011-2017



Sumber : BPS Provinsi Jambi dan BPS Nasional

Berdasarkan perkembangan perekonomian Provinsi Jambi dari tahun 2010-2017, terlihat bahwa nilai kontribusi industri pengolahan termasuk lima besar dibanding dengan lapangan usaha lainnya inimenjadi bukti pentingnya peranan sektor industri sebagai penggerakperekonomian daerah. Hal ini sekaligus menjadi pendorong bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk selalu fokus dan berkinerja secara maksimal dan terbaik. Adapun peran sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi 2010-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4. Peran Sektor Industri Terhadap PDRB 2010-2013 (persen)

No.	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,85	29,33	29,83	29,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	18,24	19,04	17,37	15,97
3.	Industri Pengolahan	11,11	10,65	10,90	10,67
4.	Listrik , Gas dan Air	0,9	0,93	0,92	0,95
5.	Konstruksi	4,54	4,28	4,80	5,69
6.	Perdagangan , Hotel dan Restoran	14,54	14,95	15,77	16,97
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,53	6,25	6,36	6,31
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	5,17	5,14	5,15	5,22
9.	Jasa-jasa	9,54	9,31	8,85	8,49
TOTAL PDRB		100	100	100	100

Tabel 3.5.	Peran Sektor Industri Terhadap PDRB 2014-2017 (persen)
------------	---

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,81	28,25	29,78	26,97
2.	Pertambangan dan Penggalian	22,99	19,00	16,13	35,57
3.	Industri Pengolahan	10,57	14,88	10,19	10,76
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,06	0,49	0,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,19	0,15	0,13
6.	Konstruksi	6,67	7,20	7,34	7,19
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,82	11,12	12,23	6,91
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,22	3,21	3,39	3,28
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,04	1,14	1,24	1,11
10.	Informasi dan Komunikasi	2,64	3,47	3,99	3,61
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,44	2,42	2,49	2,35
12.	Real Estate	1,29	1,55	1,57	1,44
13.	Jasa Perusahaan	1,03	1,16	1,23	1,05
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,17	4,87	4,74	3,42
15.	Jasa Pendidikan	4,34	3,29	3,32	3,26
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	1,07	1,10	1,15
17.	Jasa lainnya	0,84	0,95	0,98	1,03
TOTAL PDRB		100	100	100	100

Lapangan usaha yang menjadi kontributor terbesar pada tahun 2016 adalah adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 35,57 persen, sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,97 persen, sektor Industri pengolahan sebesar 10,76 persen, Kontruksi sebesar 7,19 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,91 persen.

Secara umum terjadi pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha, namun berdasarkan analisa per sektor akan terlihat beberapa lapangan usaha mengalami perlambatan. Perlambatan beberapa lapangan usaha ini dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Turunnya nilai mata uang rupiah kepada USD

Melemahnya rupiah mengakibatkan beberapa sektor menjadi sulit untuk kompetitif khususnya yang tergantung pada produk-produk impor. Keuntungan yang harusnya diterima oleh para eksportir pun tidak dapat meningkatkan neraca transaksi berjalan akibat industri manufaktur yang belum efisien dan berdaya saing.

2. Turunnya harga komoditas dunia

Melemahnya harga-harga komoditas dunia sebagai akibat melemahnya permintaan di China dan Negara-negara utama Eropa mengakibatkan industri yang mengandalkan harga komoditas mengalami pelemahan permintaan.

3. Pemberlakuan UU Minerba

Pada 11 Januari 2014, presiden SBY menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014. Peraturan itu merupakan tindak lanjut dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Dimana undang-undang tersebut mewajibkan semua perusahaan tambang membangun smelter dan dilarang untuk mengekspor bahan mentah. Hal ini bertujuan untuk menaikkan nilai tambah berupa nilai ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

3.1.2.1.2. Pertumbuhan Sektor Industri

Laju pertumbuhan industri, diukur melalui penghitungan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Sektor Industri Tahun n dikurangi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Tahun $n-1$ dibagi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Industri (ADHK) Tahun $n-1$.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2017 tercatat sebesar 3,02 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 2,5 persen, sehingga indikator kinerja tiga pada sasaran strategis satu ini persentasenya sebesar 103 persen.

Indikator persentase pertumbuhan sektor industri Pengolahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa Renstra yaitu tahun 2010 - 2017 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, dimana pada awal renstra tahun 2010 pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 5,10 persen lalu meningkat lagi menjadi 6,7 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 pertumbuhan sektor industri pengolahan sangat menggembirakan yaitu sebesar 7,90 persen namun pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar 5,69 persen,

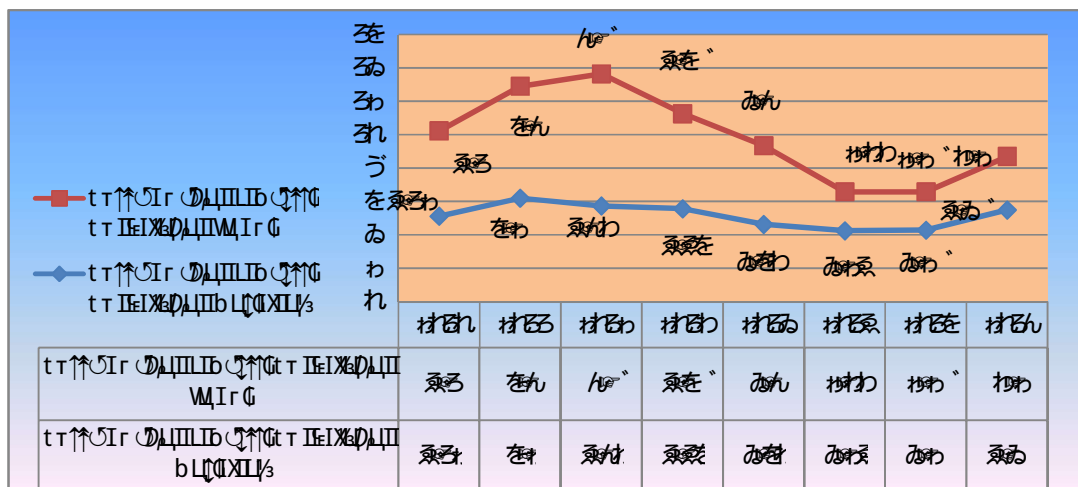
Trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jambi sejak tahun 2010-2015 pertumbuhannya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, begitu juga pada tahun 2016 ini pertumbuhan industri pengolahan Provinsi Jambi sebesar 2,29 persen jauh dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yaitu sebesar 4,37 persen. Pada grafik 3.4.dapat dilihat pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jambi sejak tahun 2010 sampai tahun 2017sebagai berikut :

[illegible]

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Industri Pengolahan Nasional trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jambi Tahun 2011 dan 2014 berada diatas pertumbuhan industri nasional, berdasarkan grafik dibawah, dapat

dilihat bahwa pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi pada tahun 2011 mencapai 6,70 persen, tahun 2012 mencapai 7,9 persen, tahun 2013 mencapai 5,69 persen dan tahun 2014 mencapai 4,70 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nasional, yaitu sebesar 6,20 persen pada tahun 2011, 5,73 persen pada tahun 2012, 5,56 persen pada tahun 2013 dan 4,63 persen pada tahun 2014, selanjutnya pertumbuhan industri pengolahan Provinsi Jambi mulai tahun 2016 hingga 2017 lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan industri pengolahan nasional. Adapun perbandingan grafiknya sebagai berikut :

Grafik 3.5. Pertumbuhan Industri Pengolahan Provinsi Jambi dibanding Nasional 2010 -2017



Sumber : BPS Provinsi Jambi dan BPS Nasional

Pembangunan bidang perindustrian sebagaimana telah ditetapkan pada misi pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2016 - 2021 adalah : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.

Strategi pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 dalam urusan perindustrian antara lain :

1. Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu merubah struktur ekonomi dari primer kesekunder dan tersier.
2. Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan.

Disamping strategi, faktor kebijakan umum dalam urusan perindustrian juga sangat penting untuk dilakukan, dimana kebijakan umum pembangunan industri Provinsi Jambi yaitu ;

1. Mendorong tumbuh kembangnya pemanfaatan IPTEKIN dalam pengolahan sumber daya alam dan pengolahan komoditi unggulan Jambi.
2. Menyiapkan infrastruktur yang dapat menjadi tempat pengolahan.
3. Membangun infrastruktur dasar di kawasan industri yang menjadi lokasi bagi industri hilir komoditi karet dan kelapa sawit.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing industri pengolahan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jambi, antara lain yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :

1. Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis bahan baku local dengan cara mendorong IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial serta promosi IKM.
2. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku local, sumberdaya setempat dengan cara penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya local yang berkelanjutan.
3. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.
4. Pembuatan penyusunan rencana induk pembangunan industri provinsi jambi, dimana pada tahun 2017 sudah sampai pada tahap kajian naskah akademik, direncanakan pada tahun 2018 ini ditindaklanjuti menjadi perda RIPIT

3.1.2.1.3. Persentase Usaha Sektor Industri

Persentase Usaha Sektor Industri, diukur melalui penghitungan Jumlah usaha industri Tahun n dikurang Jumlah usaha industri Tahun $n-1$ dibagi Jumlah usaha industri Tahun $n-1$.

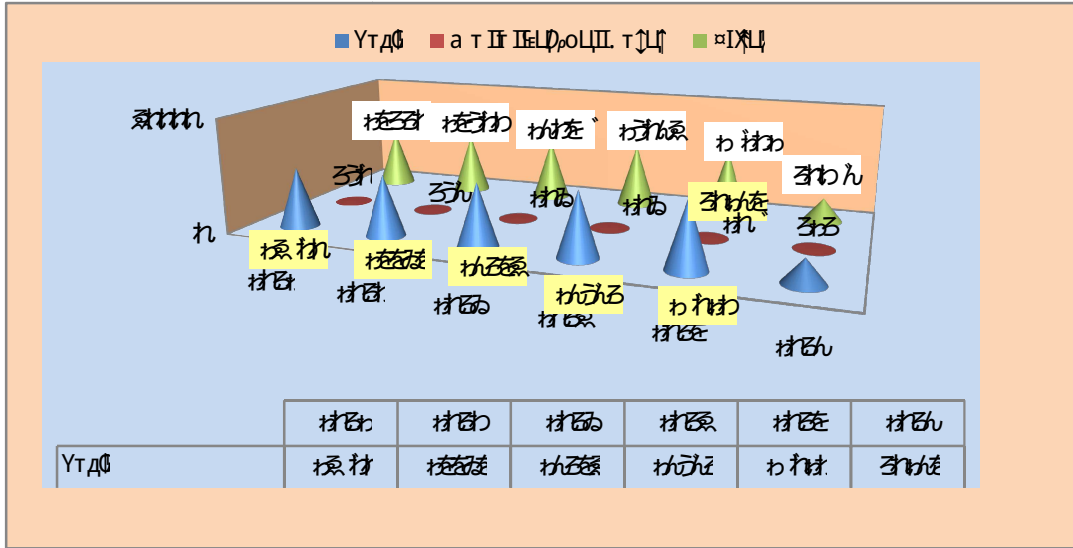
Jumlah usaha industri tahun 2017 tercatat sebesar 3,02 persen atau sebanyak 14.698.667,5 unit meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan sebesar 4,0 persen, sehingga indikator kinerja tiga pada sasaran satu persentase capaiannya sebesar 94 persen.

Salah satu indikator perkembangan industri adalah dengan melihat pertumbuhan usaha. Pertumbuhan usaha itu sendiri ditandai dengan : (1) pertumbuhan produksi, (2) pertumbuhan penjualan, (3) pertumbuhan pendapatan, dan (4) pertumbuhan laba. Pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dapat mendorong kemampuan daya saing.

Perkembangan Jumlah Unit Usaha dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 untuk semua skala industri baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk industri Kecil perkembangan jumlah unit usaha pada tahun 2015 sebanyak 27.871 unit usaha meningkat sebesar 4,1 persen atau 1.152 unit usaha menjadi 29.023 Unit Usaha di tahun 2016.

Untuk industri Menengah dan Besar perkembangan jumlah unit usaha dari tahun 2015 sebanyak 204 unit Usaha meningkat sebesar 2,45 persen atau 5 Unit Usaha menjadi 209 Unit Usaha di tahun 2016. Sedangkan perkembangan jumlah unit usaha untuk total keseluruhan semua skala industri, menunjukkan kinerja yang menurun bila dibandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2017 sebanyak 10397 unit usaha menurun sebesar 35,57 persen atau 18.835 unit usaha dari 29.232 unit usaha di tahun 2016.

Grafik 3.6.	Perkembangan Unit Usaha Industri Prov. Jambi 2012 -2017
-------------	---



Sumber : Bid. IKK dan IMB

Dalam perkembangannya usaha industri kecil, menengah dan besar sangat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu :

1. Kemampuan manajerial
2. Pengalaman pemilik atau pengelola
3. Kemampuan untuk mengakses pasar input atau output, teknologi produksi dan sumber permodalan.
4. Besar kecilnya modal yang dimiliki
5. Besarnya unit usaha
6. Lamanya usaha

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan usaha industri kecil, menengah dan besar yaitu :

1. Dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta.
2. Kondisi perekonomian yang dicerminkan dari permintaan pasar domestik maupun dari luar negeri.
3. Kebijakan pemerintah terkait peraturan-peraturan yang dikeluarkan

Langkah yang perlu diperhatikan dalam peningkatan usaha industri kecil, menengah dan besar yaitu :

1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif.

Bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya kondisi lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dan bersaing dan tidak adanya diskriminasi.

2. Pengembangan sistem pendukung usaha.

Bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses industri kecil menengah dan besar terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta peningkatan skala usahanya.

3. Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif.

Bertujuan agar dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

4. Pemberdayaan usaha skala mikro

Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlihat di dalamnya sehingga jumlah penduduk miskin akan menurun.

3.1.2.1.4. Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri

Perluasan kesempatan tenaga kerja merupakan usaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti pengembangan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

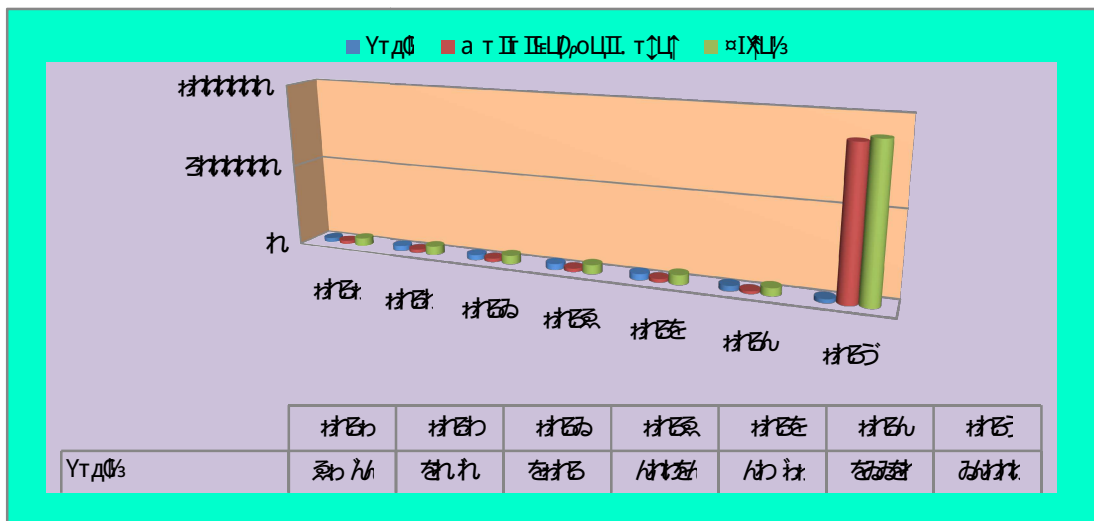
Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri, diukur melalui penghitungan Jumlah tenaga kerja industri Tahun n dikurang Jumlah tenaga kerja industri Tahun $n-1$ dibagi Jumlah tenaga kerja industri Tahun $n-1$.

Jumlah tenaga kerja industri tahun 2017 tercatat sebesar 5,02 persen atau sebanyak 116.982 orang meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan

sebesar 5,0 persen, sehingga indikator kinerja empat pada sasaran satu persentase capaiannya sebesar 104 persen.

Perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk semua skala industri baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk industri Kecil perkembangan Tenaga Kerja pada tahun 2015 sebanyak 70.367 orang meningkat sebesar 5,05 persen atau 3.555 orang menjadi 73.922 orang di tahun 2016. Untuk industri menengah dan besar perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2015 sebanyak 41.023 orang meningkat sebesar 4,99 persen atau 2.047 orang menjadi 43.060 orang di tahun 2016. Sedangkan perkembangan Tenaga Kerja untuk total keseluruhan semua skala industri, menunjukkan kinerja yang menggembirakan, yaitu dari tahun 2015 sebanyak 111.390 orang meningkat sebesar 5,02 persen atau 5.592 orang menjadi 116.982 orang di tahun 2016. Perkembangan Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.7. Perkembangan Tenaga Kerja Industri Prov. Jambi 2012 -2017



Sumber : Bid. IKK dan IMB

Memperhatikan uraian tersebut diatas terlihat bahwa jumlah tenaga kerja industri menengah dan besar dari tahun 2012-2016 mengalami naik turun. Adapun

faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil, menengah dan besar antara lain :

1. Upah

Perubahan tingkat upah/gaji akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Jumlah permintaan tenaga kerja ini suatu bentuk pengelolaan faktor produksi secara efisien yang memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut.

2. Produktivitas

Dengan semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka produksi akan memberikan keuntungan.

3. Penambahan Modal

Dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dapat juga dilaksanakan dengan cara penambahan modal terhadap setiap industri akan dapat meningkatkan bahan baku atau dapat mengembangkan usaha.

Deklarasi blueprint Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang ditandatangani oleh 10 kepala negara di Singapura pada November 2007 menjadi bukti komitmen yang kuat dari Negara-negara anggota ASEAN untuk memulai langkah integrasi dari segi ekonomi.

Bagi Indonesia keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia. Satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan SDM Indonesia kepada Negara lain dengan terbuka tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi titik balik untuk Indonesia apabila tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

Peranan tenaga kerja dalam memproduksi sampai mendistribusikan produk dan jasa akan menjadi penting. Dalam era persaingan global Indonesia harus memperhatikan tenaga kerja dan produksi yang tidak hanya sekedar soal kualitatif tetapi juga sisi kuantitatif. Daya saing Indonesia yang masih terhitung rendah dapat menjadi sandungan dalam perannya di MEA.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain :

1. Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat.
2. Menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk, memberikan jaminan sosial yang memadai
3. Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
4. Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk memperluas ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.

Dukungan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini antara lain kegiatan peningkatan kualitas SDM IKM dan peningkatan mutu produk. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sepanjang 5 tahun terakhir ini telah melakukan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja dan penumbuhan tenaga kerja yaitu sebanyak 449 orang IKM dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 353 orang IKM guna pengembangan sentra IKM melalui OVOP dan penumbuhan serta penembangan IKM melalui kewirausahaan yang didukung dengan beberapa kegiatan.

b. Bidang Industri Menengah Besar

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 96 orang pelaku Industri Menengah yang didukung melalui beberapa kegiatan antara lain :Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar, Sosialisasi Pengolahan Industri Berbasis Agro, Pelatihan Aneka Hilirisasi Industri Agro dan Kimiadll.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis satu, yaitu Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, melaksanakan 3 program bidang industri, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk membantu mengembangkan industri kecil dan menengah dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor. Sampai dengan 31 Desember 2017 realisasi fisik dari program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mencapai 100 % capaian atau realisasi kinerja Disperindag Provinsi Jambi.

Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tujuan Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Unggulan daerah	Meningkatkan kualitas daya saing produk makanan olahan daerah	Kab. Kerinci	23-26 Mei 2018	20 peserta



Tempat Proses Keripik Ubi dan Hasil Produksi Keripik Ubi

Penganuggerahan Piagam One Village One Product (OVOP) bagi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2018



Partisipasi Pameran perdagangan, investasi, pariwisata dan seni budaya yang dilaksanakan Badan Musyawarah Keluarga Jambi di Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2018



Partisipasi Pameran INACRAFT AWARD 2018 di Jakarta



2. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IMB dalam pengembangan industri agro dan kimia.).Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi mencapai 42,06 %. Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar
- b. Pengawasan teknis pengembangan industri menengah dan besar
- c. Penguatan kelembagaan industri menengah dan besar
- d. Partisi pada pameran indutsri menengah dan besar
- e. Updating industri menengah dan besar se-Provinsi J ambi



Pemberian bantuan alat pengolahan Kopi Di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci

3. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha - wirausaha IKM baru serta memperkuat kemampuan wirausaha IKM agar menjadi wirausaha yang mandiri dan professional.Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : pengembangan dan Pembinaan Wirausaha Baru Industri Kecil.

3.1.2.2. SASARAN STRATEGIS DUA

SASARAN STRATEGIS 2

Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, serta dapat mencapai tujuan kedua, yaitu Meningkatkan stabilitas harga dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri, maka ditetapkan sasaran strategis yang kedua, yaitu Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri.

Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6. Sasaran Strategis 2

MISI 2 Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri					
TUJUAN 2 Meningkatkan Stabilitas dan Penguatan Pangsa Pasar yang Terintegrasi dengan Pasar Dalam Negeri					
SASARAN 2 Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri					
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,12 %	11,60 %	12,23 %	105	Sangat Baik
Pertumbuhan sektor perdagangan	11,02 %	11,50 %	6,27%	54,52	Rendah
Persentase peningkatan usaha perdagangan	85.357 unit	7,0 %	6,98 %	99,71	Sangat Baik

3.1.2.2.1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB Daerah, diukur melalui penghitungan besaran persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB ADHB sesuai dengan data BPS yang dikeluarkan.

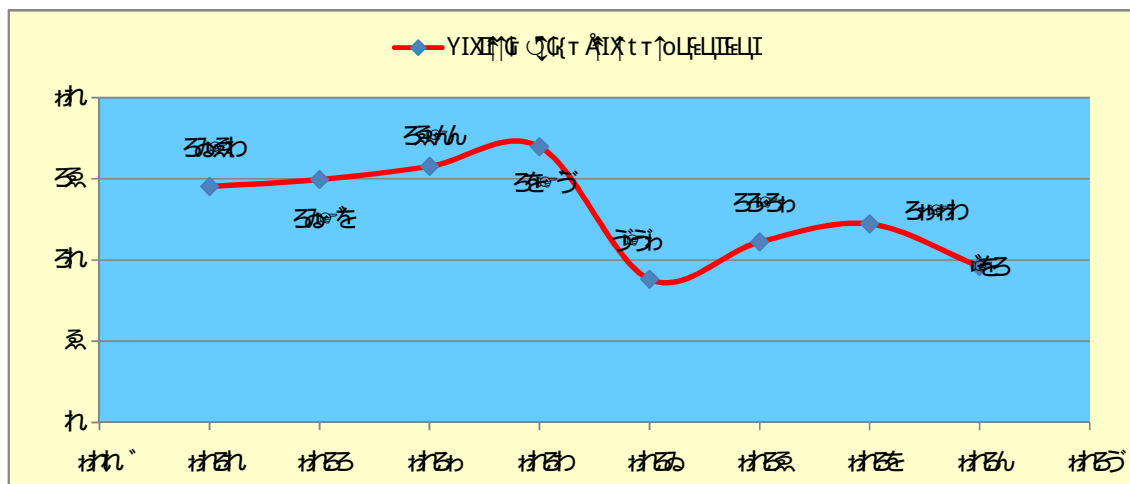
Target kontribusi sub sektor perdagangan terhadap total PDRB ADHB Provinsi Jambi Tahun 2016 ditetapkan sebesar 11,50 persen, realisasinya dapat melampaui target, yaitu sebesar 12,23 persen atau mencapai Rp 5.595,2 trilyun terhadap total PDRB ADHB Provinsi Jambi yang mencapai nilai sebesar Rp

45.735,3trilyun. Dengan demikian capaian kinerja pada sasaran strategis dua, indikator kinerja satu ini adalah sebesar 106,35 persen

Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi di RENSTRA 2010-2015 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi pada tahun 2010 sebesar 14,53 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 14,06 persen, disambut dengan tren positif di tahun 2013 dan 2014 yang mengalami peningkatan terus menjadi 15,77 persen dan 16,98 persen. Namun pada tahun 2014 kontribusi perdagangan terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 8,82 persen namun pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 11,12 persen. Total Sub Sektor Perdagangan Provinsi Jambi selama tahun 2016 nilainya mencapai Rp 5.595,2Trilyun memberikan kontribusi sebesar 12,23 persen terhadap Total Produk Domestik Regional Bruto ADHB Provinsi Jambi tahun 2016 yang mencapai nilai Rp 45.735,3Trilyun.

Pada grafik 3.8.dapat dilihat kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi sejak tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

Grafik 3.8. Kontribusi Sektor Perdagangan Provinsi Jambi 2010-2017

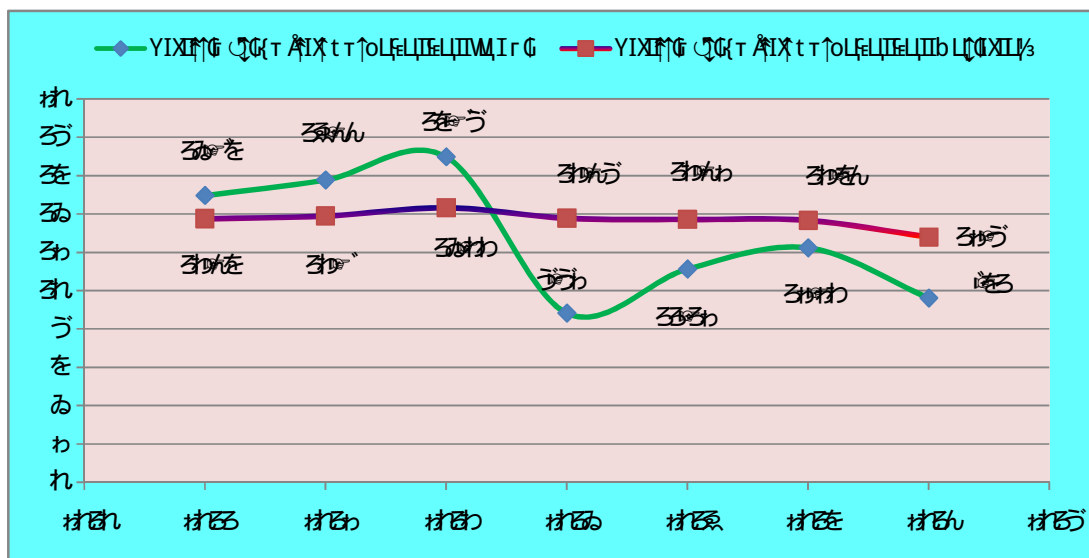


Sumber : BPS Provinsi Jambi diolah

Perkembangan kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2011 hingga 2013 berada diatas kontribusi sektor perdagangannasional, dimana

kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2011 mencapai 14,96 persen, tahun 2012 mencapai 15,77 persen dan 2013 mencapai 16,98 persen sedangkan kontribusi sector perdagangan nasional pada tahun 2011 mencapai 13,76 persen, tahun 2012 mencapai 13,9 persen dan 2013 mencapai 14,33 persen. Namun pada mulai tahun 2014 - 2016 kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi berada dibawah sektor perdagangan nasional. Pada grafik 3.9. dapat dilihat perkembangan kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi dengan perkembangan kontribusi sektor perdagangan nasional sebagai berikut :

Grafik 3.9. Kontribusi Sektor Perdagangan Provinsi Jambi dibanding Nasional 2011-2017



Sumber : BPS Provinsi Jambi dan BPS Nasional

Berkaitan dengan kontribusi sektor perdagangan tersebut diatas, hal-hal yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam upaya peningkatan kontribusi mulai tahun 2010-2016 antara lain :

1. Fasilitasi Pelaku Usaha

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 696 orang pelaku usaha yang didukung melalui beberapa kegiatan antara lain Pembinaan Pasar Lelang Karet dan Agro, Penguatan Kelembagaan Usaha Perdagangan berupa Sosialisasi kewirausahaan untuk Usaha Dagang Kecil/Informal dan Fasilitasi HAKI dan

Produk Halal dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha agar dapat memaksimalkan potensi pasar dalam negeri.

2. Promosi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Partisipasi pameran dalam negeri, yaitu upaya memperluas pemasaran produk UMKM dengan mengikutsertakan dalam pameran dalam negeri, dimana dalam kurun waktu 2010-2016 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah memfasilitasi + 140 UKM untuk mengikuti pameran dalam negeri.
- b. Penyelenggaraan Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional/Nasional
- c. Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kampanye 100% Cinta Indonesia) yaitu suatu gerakan mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk lebih mencintai, membeli dan menggunakan hasil karya Anak bangsa.
- d. Sosialisasi dan iklan layanan masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui Media Elektronik (TV, Radio, LED), Media Cetak (Koran, Billboard, Majalah), dan Media Online tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pameran Produk Dalam Negeri pada Pusat Perbelanjaan Modern. Selain itu,, juga dilakukan kampanye P3DN melalui jalur pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia serta Sosialisasi kepada pelaku Usaha untuk penggunaan label 100% Cinta Indonesia.

3. Advokasi dan Peningkatan Kerjasama (Kemitraan)

Forum dagang/misi dagang lokal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertemukan antara UMKM dari berbagai propinsi Jambi dengan propinsi lain (penjual dan pembeli) yang pada gilirannya produk-produk unggulan dari satu daerah akan banyak beredar di daerah lain sehingga produk dalam negeri menguasai pasar di seluruh propinsi serta meningkatkan transaksi domestik.

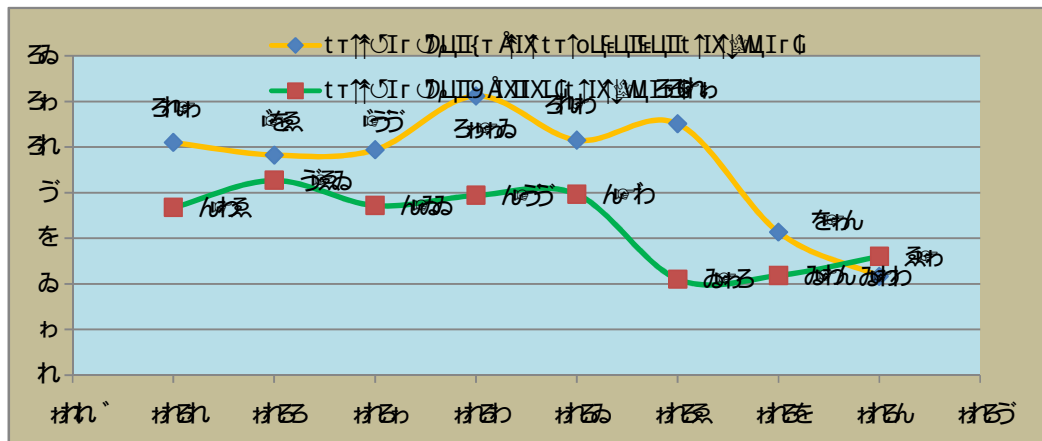
3.1. 2.2.2. Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Laju pertumbuhan sektor perdagangan, diukur melalui penghitungan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Sektor Perdagangan Tahun n dikurang Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Sektor Perdagangan Tahun $n-1$ dibagi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Tahun $n-1$.

Pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Jambi tahun 2017 tercatat sebesar 6,61 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 11.65 persen. Sebagaimana pada sasaran strategis dua, indikator kinerja dua persentase capaiannya baru sebesar 54,52persen. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2016 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 12,23 persen.

ከፊ. ሁ ሠ! ለፀሁ ፍላጎት ሃፍጥ፣

Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Jambi 2010-2016

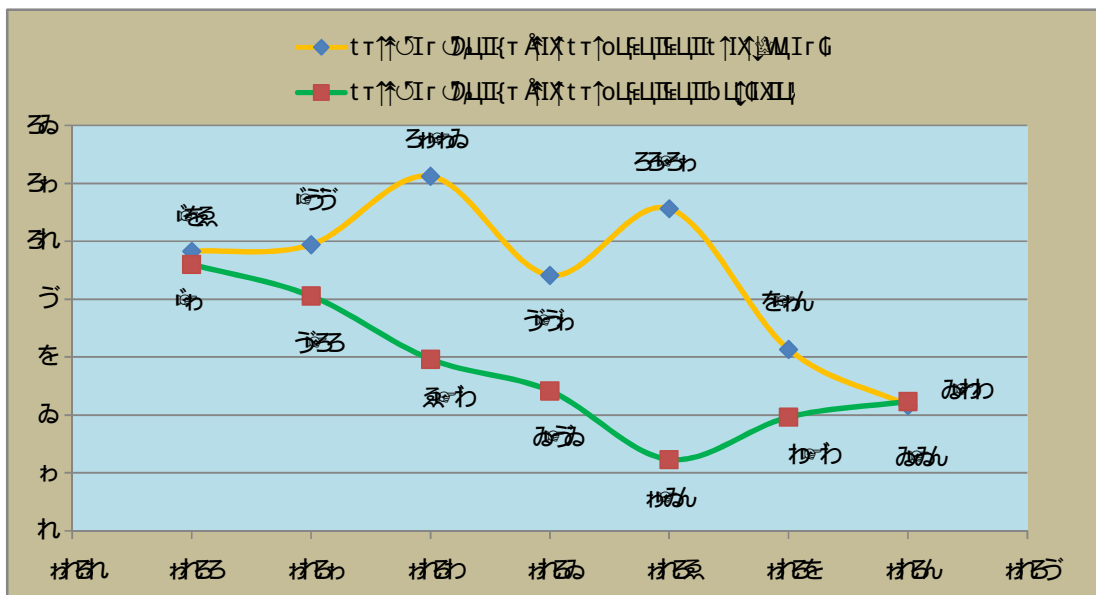


Sumber : BPS Provinsi Jambi diolah

Pada grafik 3.10 diatas, terlihat bahwa pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Jambi selama tahun 2011-2016 selalu berada diatas pertumbuhan sektor perdagangan nasional. Pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Jambi tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebagaimana pada grafik diatas terlihat melemah hal ini disebabkan karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Semakin melemah nilai rupiah maka semakin menurun PDRB. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2016 yang menembus diatas Rp. 13.000 lebih per 1 US \$, menyebabkan pengaruh ke berbagai bidang, tak terkecuali perdagangan. Pelemahan rupiah ini cukup memberatkan pelaku usaha, terutama yang menggunakan bahan baku impor karena biaya produksi menjadi meningkat. Peningkatan biaya produksi membuat produsen terpaksa meningkatkan harga jual barang sehingga konsumsi masyarakat pun menurun.

Pada grafik 3.11.dibawah ini dijelaskan perbandingan pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Jambi dengan pertumbuhan sektor perdagangan nasional 2011-2016 sebagai berikut.

Grafik 3.11. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Jambi dibanding Nasional 2011-2017



Sumber : BPS Provinsi Jambi dan BPS Nasional

3.1. 2.2.3. Persentase usaha sektor Perdagangan

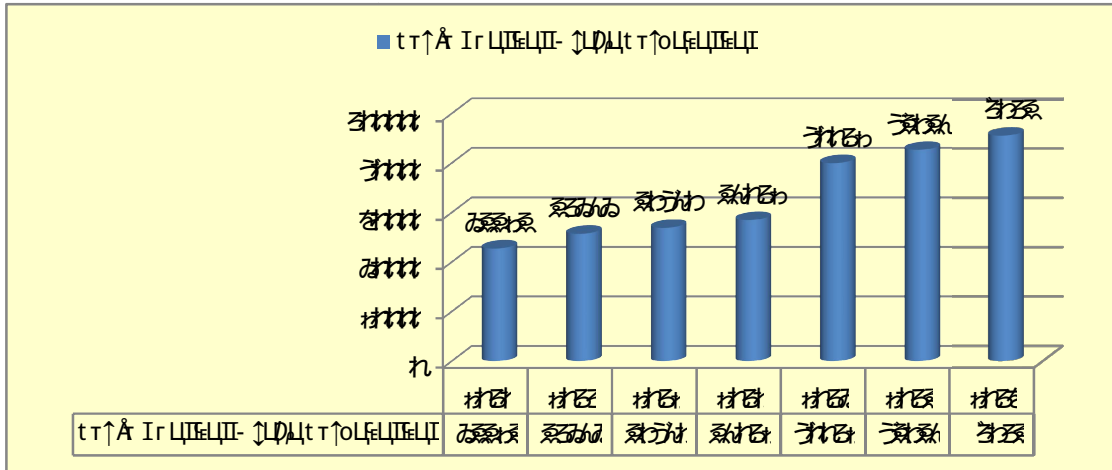
Usaha perdagangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan transaksi pembelian barang dagang kemudian dijual kembali tanpa mengubah bentuk.

Persentase Usaha Sektor Perdagangan, diukur melalui penghitungan Jumlah usaha perdagangan Tahun n dikurang Jumlah usaha perdagangan Tahun n-1 dibagi Jumlah usaha perdagangan Tahun n-1.

Jumlah usaha perdagangan tahun 2017 tercatat sebesar 6.98 persen atau sebanyak 91.315 unit mendekati target yang ditetapkan sebesar 7,0 persen, sehingga indikator kinerja tiga pada sasaran satu persentase capaiannya sebesar 104 persen.

Perkembangan usaha sektor perdagangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian jumlah usaha perdagangan selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 3.12.	Perkembangan Usaha Perdagangan Provinsi Jambi 2010-2016
--------------	---



Sumber :Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Dari grafik diatas terlihat bahwa usaha sektor perdagangan pada tahun 2010 sebanyak 45.525 unit, tahun 2011 meningkat menjadi 51.474 unit (13,09 persen), tahun 2012 sebanyak 53.873 unit (4,66 persen), tahun 2013 sebanyak 57.012 unit (5,83 persen), tahun 2014 sebanyak 80.012 unit (40,34 persen), tahun 2015 sebanyak 85.357 unit (6,68 persen) dan pada tahun 2016 kembali meningkat sebanyak 91.315 unit (6,98 persen).

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha perdagangan tersebut diatas antara lain :

1. Faktor Produksi Alam
2. Faktor Produksi Manusia/Tenaga Kerja
3. Faktor Produksi Modal
4. Faktor Produksi Manajemen

Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan usaha perdagangan tersebut yaitu :

1. Penciptaan Iklim usaha yang kondusif.
2. Bantuan Permodalan
3. Perlindungan Usaha
4. Pengembangan Kemitraan
5. Mengembangkan Promosi

6. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Dukungan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran tersebut diatas sangat diperlukan antara lain adanya intensitas kegiatan promosi dan ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan usaha perdagangan di tanah air khususnya di Provinsi Jambi. Guna mendukung terciptanya perluasan jaringan pasar bagi usaha perdagangan di Provinsi Jambi yaitu dengan melaksanakan program antara lain :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Program ini bertujuan yaitu untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Sampai dengan 31 Desember 2017 realisasi fisik dari Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri telah mencapai 75,02 %. Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi bertujuan menciptakan system perdagangan yang lebih baik melalui mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran melalui pelaksanaan lelang agro



- b. Kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.



- c. Kegiatan pasar Murah

Dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri, dilaksanakan kegiatan Pasar Murah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan Pasar Murah telah dilaksanakan di 6 lokasi yaitu Kab. Tanjab Timur, Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Bungo, Kab. Batanghari dan Kota Jambi. Kegiatan yang dibiayai melalui dana dekosentrasi ini hanya sebagai penunjang dari kegiatan pasar murah berupa barang-barang kebutuhan bahan pokok bersubsidi yang dibiayai melalui dana APBD 1 Provinsi Jambi

- c. Kegiatan Pengolahan data entry SIUP dan TDP

- d. Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal

2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan meningkatkan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran. Sampai dengan 31 Desember 2017 realisasi fisik dari program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan mencapai 100 % capaian atau realisasi kinerja Disperindag Provinsi Jambi.

3.1.2.4. SASARAN STRATEGIS TIGA

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalnya Impor

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, serta dapat mencapai tujuan ketiga, yaitu Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas, maka ditetapkan sasaran strategis yang ketiga, yaitu Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalnya Impor.

Kegiatan perdagangan dalam kancah internasional direalisasikan dalam bentuk ekspor dan impor antar negara. Perdagangan ini terjadi karena adanya ketergantungan dari masing-masing negara yang membutuhkan berbagai macam komoditi dengan negara yang memiliki modal dan teknologi yang memadai.

Sebagai bagian dari negara Indonesia maka Provinsi Jambi juga aktif dalam perdagangan internasional. Provinsi Jambi terus berupaya untuk terus meningkatkan ekspor agar dapat mengumpulkan devisa bagi pembiayaan impor dan menambah pendapatan daerah. Surplus yang didapatkan dari neraca perdagangan dapat membuat pertumbuhan perekonomian maju dan mendorong masyarakatnya untuk berkarya dan bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Dalam sasaran strategis tiga ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Sasaran Strategis 3

MISI 2					
Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri					
TUJUAN 3					
Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas					
SASARAN 3					
Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalnya Impor					
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase nilai ekspor non migas	US \$ 2.635 juta	10,0 %	4,69 %	58,60	Rendah
Persentase nilai impor	US \$ 109,03 juta	5,0 %	14,13 %	390,4	Amat Baik

3.1.2.3.1. Persentase Nilai Ekspor Non Migas

Secara garis besar, barang-barang yang diekspor Provinsi Jambi terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam (migas) dan nonmigas. Barang-barang yang termasuk migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji. Adapun barang-barang yang termasuk nonmigas sebagai berikut.

1. Hasil pertanian dan perkebunan. contohnya, karet, kopi, dan kopra.
2. Hasil laut terutama ikan dan kerang.
3. Hasil industri. Contohnya kayu lapis, konfeksi, minyak kelapa sawit, meubel, bahan-bahan kimia, pupuk, dan kertas.
4. Hasil tambang nonmigas. Contohnya bijih nikel, bijih tembaga, dan batubara.;

Kegiatan ekspormembawa banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut ini beberapa manfaat kegiatan ekspor sebagai berikut :

1. Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia

Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Misalnya, pakaian batik merupakan salah satu produk Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila permintaan terhadap pakaian batik buatan Indonesia semakin meningkat, pendapatan para produsen batik semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang.

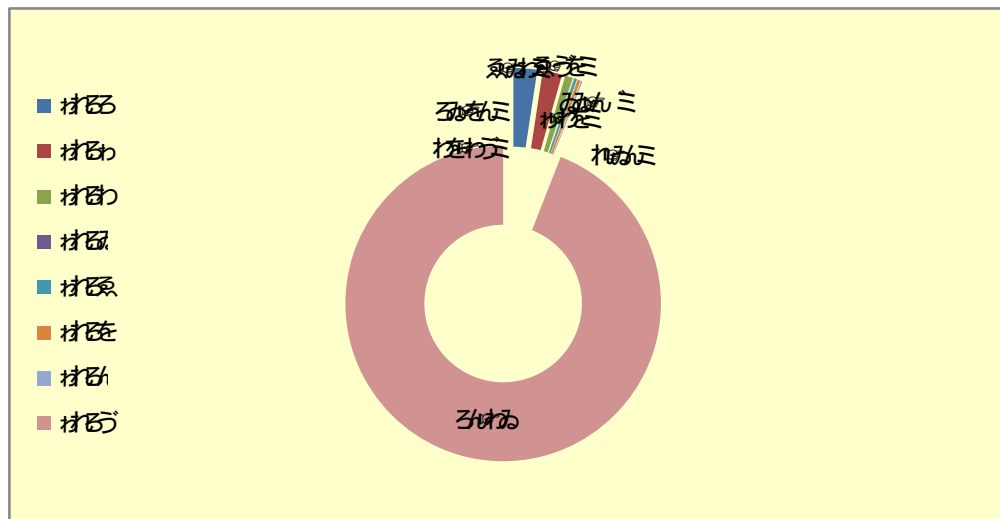
2. Menambah Devisa Negara

Perdagangan antarnegara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

3. Memperluas Lapangan Kerja

Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga lapangan kerja semakin luas.

Grafik 3 13. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Jambi 2011-2017



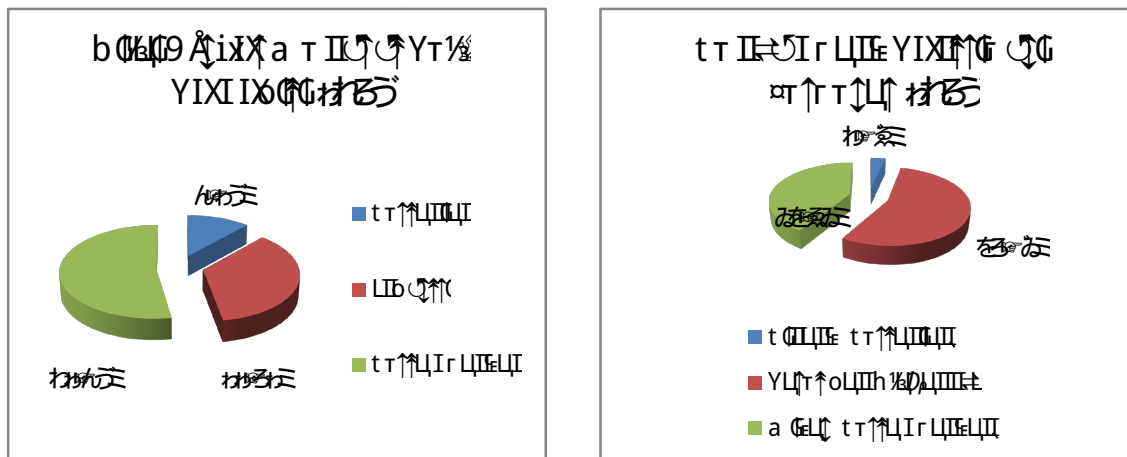
Sumber : Bidang Perdagangan Luar Negeri

Grafik diatas menunjukan bahwa persentase Nilai Ekspor Dalam Negeri Di Provinsi Jambi 2011-2016 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 sebesar 44,79 persen. Akan tetapi pada tahun 2012 dan tahun 2013 Persentase pertumbuhan nilai ekspor dalam negeri di Provinsi jambi mengalami penurunan menjadi 36,38 persen dan 14,67 persen hal ini disebabkan oleh krisis global dan naiknya harga BBM serta kebutuhan pokok lainnya sehingga pada tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 persentase pertumbuhan nilai ekspor dalam negeri Jambi mengalami peningkatan menjadi 0,47 persen. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 5,43 persen.

Kinerja ekspor Tahun 2016 meningkat 5,86 persen atau sebesar US \$984,60 juta dibanding tahun 2015 sebesar US \$ 894,15 juta. Peningkatan tersebut dipicu oleh naiknya ekspor non migas sebesar 4,62 persen. Disisi lain, ekspor migas turun sebesar 55,36 persen. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016-2021 sebesar 10 persen, maka nilai ekspor 2016 mengalami penurunan, sehingga indikator kinerja satu pada sasaran tiga persentase capaiannya hanya sebesar 58,6 persen. dan pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar 2.342.254.576,- (2.36 %)

Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok pertambangan sebesar 49,34 persen, diikuti kelompok industri sebesar 46,40 persen dan kelompok pertanian sebesar 4,26 persen. Bila dirinci menurut komoditi, kelompok pertambangan didominasi oleh migas, kontribusinya 48,02 persen, penyumbang kontribusi terbesar dari kelompok industri yaitu karet dan olahannya yang mencapai 19,82 persen. Sedangkan dari kelompok pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangsih 3,96 persen.

Grafik 3.14.	Struktur Nilai Ekspor Menurut Kelompok Komoditi di Provinsi Jambi
--------------	---



Secara umum nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Bulan Desember 2017 ke beberapa Negara utama mengalami kenaikan. Ekspor Jambi mengalami kenaikan adalah ekspor ke Singapura, Inggris, Cina dan Jepang. Sedangkan pergerakan penurunan ekspor dapat diamati ke beberapa Negara seperti Thailand, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, India, Australia, Korea Selatan dan Taiwan.

Bila dikaitkan dengan kinerja ekspor kita yang cenderung stagnan karena melemahnya pasar tujuan ekspor akibat situasi lesunya perekonomian negara-negara Eropa dan Amerika serta nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar; maka upaya mendorong kinerja perdagangan dalam negeri (ekspor domestik), bagi Pemerintah Jambi menjadi salah satu strategi yang hingga saat ini menjadi fokus utama dan diprediksikan akan terus meningkat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia umumnya, maka upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan ekspor antara lain :

1.Diversifikasi macam barang ekspor

Misalnya, semula mengekspor kelapa sawit, sekarang mengekspor kelapa sawit dan minyak kelapa sawit. Adapun penganekaragaman honisontal berarti menambah macam barang yang diekspor dengan barang yang tidak merupakan produk lanjutan dan barang lama.

2. Memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor

Agar ekspor meningkat, pemerintah perlu membenikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Misalnya, memperbanyak bahan produksi dengan harga murah. Jika harga bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi barang ekspor murah, harga barang ekspor tersebut di dalam negeri juga murah.

3. Mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri

Pemerintah meningkatkan ekspor dengan mengusahakan harga di dalam negeri lebih murah. Cara yang ditempuh antara lain menekan laju inflasi dan menciptakan tingkat bunga pinjaman yang rendah.

4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah mendorong peningkatan ekspor dengan memberikan kemudahan-kemudahan misalnya penyederhanaan tata cara atau prosedur ekspor dan penurunan bea ekspor.

5. Menjaga kestabilan kurs valuta asing

Kestabilan kurs valuta asing mempermudah para pedagang internasional dalam meramal nilai rupiah dan hasil ekspornya. Dengan kepastian nilai rupiah ini, para eksportir menjadi lebih mudah dalam menentukan harga tawar menawar di pasar internasional. Keadaan ini menghilangkan keraguan eksportir untuk melakukan perdagangan internasional.

6. Pembuatan perjanjian dagang internasional

Beberapa negara sering melakukan perjanjian dagang untuk memperoleh kepastian. Perjanjian tersebut mencakup kesediaan masing-masing negara untuk

menjadi pembeli atau penjual suatu barang. Dengan perjanjian ini, masing-masing negara memperoleh keuntungan yaitu: penjual dapat mempunyai pasar yang pasti, dan pembeli dapat mempunyai penjual yang pasti .

7. Peningkatan promosi dagang di luar negeri

Untuk mengenalkan produk dalam negeri di pasaran internasional, sering dilakukan promosi dagang. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olah raga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi promosi. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta, maupun pemerintah.

Selain itu, pemerintah maupun Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menangani promosi dan pusat informasi dagang di luar negeri. Misalnya kantor-kantor pusat promosi dagang Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) yang mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri.

8. Sosialisasi kepada pelaku ekonomi

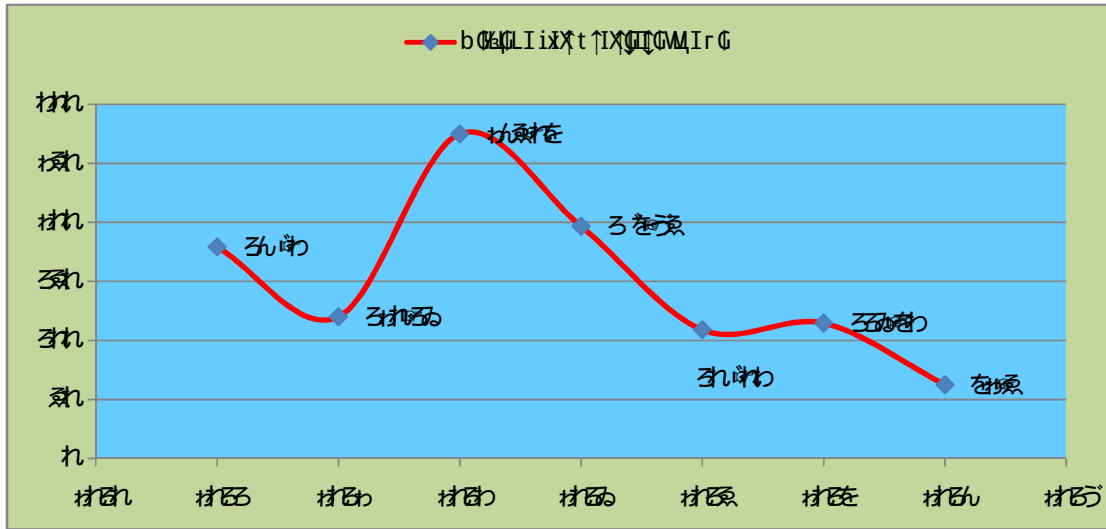
Untuk meningkatkan ekspor, pemerintah memberikan sosialisasi kepada pengusaha kecil dan menengah tentang tata cara melakukan ekspor. Banyak produk masyarakat yang diminati pembeli mancanegara, namun karena banyak pengusaha kecil dan menengah tidak mengetahui bagaimana cara mengekspornya maka tidak diekspor produk tersebut

3.1.2.3.2. Persentase Nilai Impor

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara 2 negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Grafik 3 .15.

Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi 2011-2018



Grafik diatas menunjukan bahwa persentase Nilai Impor Dalam Negeri Di Provinsi Jambi 2011-2017 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 nilai impor sebesar US \$ 179,3 juta mengalami penurunan sebesar 49,24 % dibanding tahun 2012 dengan total impor sebesar US \$ 120,14 juta. Akan tetapi pada tahun 2013 terjadi kenaikan nilai impor hampir mencapai 128,95 % (US \$ 275.06 juta). Selanjutnya pada tahun 2014 dan 2015 terus mengalami penurunan sebesar 39,93 % (US \$ 196,85) dan 80,55 % (US \$ 109,03%).

Nilai impor tahun 2016 sebesar US \$ 114,63 juta mengalami kenaikan 5,1 % Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar (54.58 %). dengan Nilai impor pada tahun 2017 sebesar US \$ 62.5 juta. dibanding tahun 2015 dan selanjutnya bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jambi 2016-2020 sebesar 5%, capaian indikator kinerja dua pada sasaran tiga persentase capaiannya sebesar 102 %. Meningkatnya nilai impor ini dipicu oleh pertambahan kelompok komoditi mesin dan alat angkutan berupa kapal untuk pengangkutan orang dan barang. Impor di Provinsi Jambi melewati tiga pelabuhan utama di Jambi yaitu ; Pelabuhan Talang Duku Jambi, Muaro Sabak dan Kuala Tungkal.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Provinsi Jambi, melaksanakan program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan disamping mendatangkan devisa bagi negara.

Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- ↳ Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah bertujuan meningkatkan kinerja ekspor daerah (non migas) dan mencari solusi terhadap permasalahan yang menyangkut ekspor terutama transportasi dan sarana pelabuhan.
- ↳ Kegiatan Pelatihan Ekspor Bagi IKM dan UKM bertujuan Meningkatkan kemampuan pelaku IKM dan UKM dalam pelaksanaan ekspor dan dapat mengikuti perkembangan dunia di Bidang Perdagangan dan Informasi dalam rangka mengantisipasi telah terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean.
- ↳ Kegiatan Pameran Perdagangan Luar Negeri (Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) bertujuan Mempromosikan potensi dan peluang bisnis, bagi produk-produk unggulan yang dimiliki oleh perusahaan berorientasi ekspor yang ada dalam Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi.

2. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor sesuai dengan SNI, produk ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global dan Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PA. Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi bertujuan untuk operasional kegiatan Laboratorium UPTD BPSMB. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :

- ¿ *Telah terkalibrasinya alat-alat standar lab sebanyak 20 unit PMB Jakarta.*
 - ¿ *Terpeliharanya peralatan lab sebanyak 5 unit.*
- b. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran bertujuan untuk mengurangi peredaran barang non ber SNI di pasaran. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : *telah dilaksanakan pengujian sampel produk di 8 Kab/Kota kecuali Kota Sungai Penuh, Kota Jambi dan Tanjab Timur. Adapun sampel yang diuji yaitu pupuk 5 jenis, minyak goreng, AMDK, garam beryodium.*
- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor bertujuan untuk Peningkatan pelayanan pengujian Laboratorium UPTD BPSMB. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - ¿ *Telah dilakukan surveilen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada bulan Mei dan Agustus 2017.*
 - ¿ *Telah dilakukan uji profisiensi untuk SIR, Caciavera, Biji Kopi, Garam Beryodium, pupuk, CPO, Biji Pinang dan AMDK*
 - ¿ *Telah dilakukan uji kalibrasi terhadap besaran suhu, volume, tekanan, panjang dan instrumen analitik (ph meter)*
- d. Kegiatan Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah Terakreditasi bertujuan untuk Peningkatan akreditasi dan kepercayaan pelanggan dan peningkatan PAD. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - ¿ *Telah dilaksanakan Sosialisasi Lab. Kalibrasi di 10 Kab/Kota kecuali Kota Sungai Penuh.*
 - ¿ *Telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat kepada pelanggan lab UPTD BPSMB sebanyak 53 responden.*
- e. Kegiatan Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium bertujuan agar tersedianya peralatan dan bahan penunjang yang sesuai dengan kebutuhan lab. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - ¿ *Telah dipenuhinya kebutuhan bahan-bahan kimia keperluan pengujian pada lab sebanyak 25 Unit.*

- ¿ Telah dipenuhinya kebutuhan penambahan peralatan untuk keperluan pengujian pada lab kalibrasi dan lab. Pengujian sebanyak 41 Unit.
- ¿ Perawatan dan pemeliharaan alat lab sebanyak 12 unit.

3.1.2.4. SASARAN STRATEGIS EMPAT

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi

Untuk dapat mencapai misi ketiga, yaitu Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan, serta dapat mencapai tujuan keempat, yaitu Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha, maka ditetapkan sasaran strategis yang keempat, yaitu Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi.

Dalam sasaran strategis yang empat ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.	Sasaran Strategis 4
------------	---------------------

MISI 3 Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan					
TUJUAN 4 Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha					
SASARAN 4 Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi					
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2015	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP	70 %	75 %	75 %	100	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa	74,0 %	75,0 %	74,67 %	99,56	Sangat Baik

3.1.2.4.1. Persentase Layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP

Untuk mendukung kinerja layanan publik dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui penyediaan layanan administrasi perkantoran, pengadaan peralatan sarana penunjang perindustrian dan perdagangan lainnya. Penyelenggaraan ketersediaan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap dan ditargetkan pada tahun 2017 sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik sudah tersedia sebesar 75% dan meningkat sampai dengan 100% pada tahun 2021.

Untuk berhasilnya pelayanan publik ini perlu didukung dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi setiap melaksanakan kegiatan harus memiliki kerangka acuan kerja dan SOP sehingga kegiatan tersebut pelaksanaannya betul-betul terukur.

Sejak tahun 2012, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menggunakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) bekerja sama dengan Instansi terkait dan ini sebagai tolak ukur pertama dalam melakukan pelayanan, dikarenakan ULP telah melayani hampir seluruh unit di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara online. Untuk tahun 2017 ini memang belum dilaksanakan survey terhadap kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan pengadaan barang/jasa. Kedepan hal ini akan diperhatikan demi untuk peningkatan dalam pelayanan publik.

3.1.2.4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap beberapa Layanan Jasa

Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi apparatus Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara. Pelayanan publik oleh birokrasi public dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat, Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai

pemberian pelayanan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan public masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah sebagai penyedia layanan semata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menekankan perlu disusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggaraan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan RB Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2018 ini Tim Survey dan Pengolah Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD BPSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niagatelah melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perlindungan Konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan publik melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat dilakukan masing-masing UPTD sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Survei Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2018

dan telah dijawab oleh 150 responden. Selanjutnya Survei UPTD BPSMB dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dan telah dijawab oleh 60 responden. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tersebut diatas menyebutkan pengukuran hasil survey mencakup 14 unsur pelayanan yang harus diukur sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10.	Aspek Penilaian Dalam Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat 2018
-------------	---

No.	Aspek Penilaian	Hasil Survey IKM PKTN	Hasil Survey IKM UPTD BPSMB	Rata-rata (%)
1.	Prosedur Pelayanan	1,97	3,29	3,61
2.	Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan	2,64	2,94	4,11
3.	Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan	2,43	3,20	5,03
4.	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,23	2,71	4,58
5.	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	2,91	3,23	4,52
6.	Kemampuan Petugas Pelayanan	2,67	3,17	4,25
7.	Kecepatan Pelayanan	2,91	3,11	4,46
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan	2,66	3,20	4,26
9.	Kesopanan dan keramahan petugas	2,65	3,17	4,23
10.	Kewajaran Biaya Pelayanan	2,69	2,97	4,17
11.	Kesesuaian Biaya Pelayanan	2,51	2,88	3,95
12.	Ketepatan Jadwal Pelayanan	3,31	2,66	4,64
13.	Kenyamanan Lingkungan	2,80	3,11	4,35
14.	Keamanan Pelayanan	2,75	3,17	4,33
TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN		67,66	76,02	71,46

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survey rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang serta pelayanan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebesar 71,46 persen dan ini mendekati target yang ditetapkan sebesar 75 persen.

3.2. Realisasi Keuangan

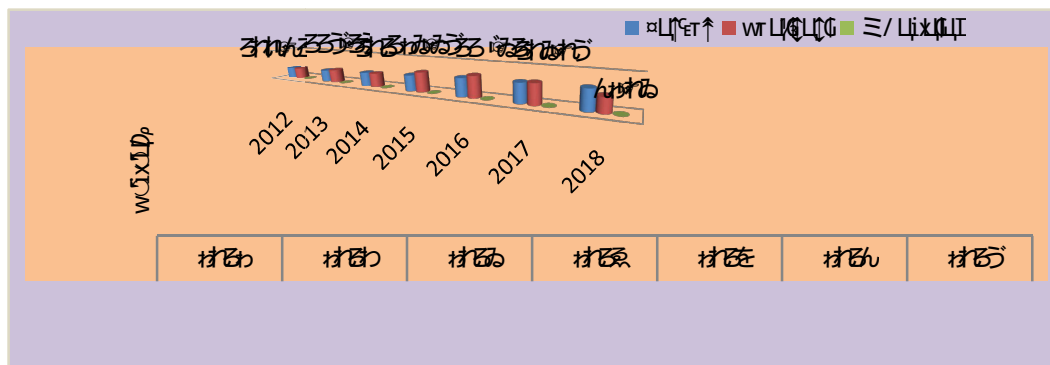
3.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017

Sumber penerimaan (PAD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi diperoleh dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Metrologian berupa jasa tera alat Ukur Takar Timbangan dan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2018 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan target sebesar Rp. 310.000.000,- Realisasinya sebesar Rp. 223.353.000,- (72,04%). Adapun sumber / unit penghasil, dapat dilihat pada tabel 3.10.dibawah ini :

No.	Sumber / Unit Penghasil	Target	Realisasi	Persentase
1.	UPTD BPSMB	310.000.000	223.353.000	72,04

Gafik 3.16.	Perkembangan Penerimaan PAD dari jasa pelayanan pengujian mutu komoditi ekspor tahun 2012 - 2018
-------------	--



{ 5 1 r t 5 4 n c t 5 . t { a . 5 0 i x 1 0 b l e t 1 x 1 0 1 0 m i r (

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 25.479.556.110,00,- Realisasinya sebesar Rp. 23.861.370.215,00,- (93,65%), Sisanya sebesar Rp. 1.580.279.859,00,- (6,35%) dengan rincian sbb :

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.749.793.180,00,- terealisasi sebesar Rp. 12.285.273.221,00,- (89,35%) Sisanya sebesar Rp. 11.464.519.959,00,- (10,65%);

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 11.784.795.000,00,- Realisasinya sebesar Rp. 10.191.150.611,00(86,48%), sisanya sebesar Rp. 1.593.644.389,00,- (13,52%), dengan rincian sbb:

- Belanja Pegawai Pagu sebesar Rp. 13.749.793.180,00,- Realisasi sebesar Rp. 12.288.296.669,00,- (89,37%) Sisanya sebesar Rp. 1.461.496.511,00,- (10,62%)
- Belanja Barang dan Jasa, Pagu sebesar Rp. 9.916.934.455,00,- Realisasi sebesar Rp. 8.400.443.351,00,- (84,71%) Sisanya sebesar Rp. 1.516.491.104,00(15,29%).
- Belanja Modal, Pagu sebesar Rp. 969.650.045,00,- Realisasi sebesar Rp. 941.100.760,- (97,05%) Sisanya sebesar Rp. 28.549.2885.000,00(2,95%), Realisasi anggaran APBD Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2018

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa	
			Anggaran	%	Anggaran	%
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.749.793.180,00	12.285.273.221,00	89,35	1.464.519.959	10,65
II.	BELANJA LANGSUNG	11.784.795.000,00	10.191.150.611,00	86,48	1.593.644.389,00	13,52
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.621.230.900,00	1.546.053.617,00	98,86	75.177.283,00	4,64
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.417.518.045,00	1.372.281.873,00	96,81	45.235.172,00	3,19
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	194.400.000,00	187.515.000,00	96,46	6.885.000,00	3,54
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.130.000,00	51.584.000,00	88,74	6.546.000,00	11,26
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	566.489.675,00	529.937.516,00	93,55	36.552.159,00	6,45

	Capaian kinerja dan Keuangan					
6.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	865.320.000,00	830.765.48160	96,01	34.554.519,00	3,99
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.348.814.000,00	2.348.980.037,00	97,48	60.833.963,00	2,52
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	179.500.000,00	178.156.458,00	99,25	1.343.542,00	0,75
9.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	861.900.000,00	838.128.600,00	97,24	23.771.400,00	2,76
10.	Program Pengembangan Standarisasi Nasional	822.027.000,00	718.848.300,00	87,45	103.178.700,00	12,55
11.	Pengembangan Industri Agro dan Kimia	1.772.814.820,00	745.733.751,00	42,06	1.027.081.069,00	57,94
12.	Program Peningkatan daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	281.093.500,00	269.131.000,00	95,74	11.962.500,00	4,26
13.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	734.557.060,00	574.034.978,00	78,15	160.522.082,00	21,85
TOTAL BELANJA LANGSUNG		11.784.795.000,00	10.191.150.611,00	86,48	1.593.644.389,00	13,52
GRAND TOTAL		25.632.590.000,00	22.476.423.832,00	87,67	3.058.164.348,00	12,33

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan Sekretariat Disperindag Provins Jambi

3.2.3.Realisasi APBN 2017

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran dekonsentrasi APBN dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dengan total sebesar Rp. 4.155.951.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.941.368.518,- (94,84%) dengan sisa anggaran

sebesar Rp. 214.581.482,- (5,0 %). Realisasi penyerapan dana dekosentrasi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Anggaran	%	Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
I.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.074.000.000	1.935.364.500	93,31	138.635.500	6,69
1.	Program PP IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
1.	Pelatihan pengolahan hasil laut (ikan) di kabupaten tanjung jabung timut (20 orang) dan peltihan kerajinan dari batok kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (20 Orang)	167.134.000	143.706.500	85,98	23.427.500	14,02
2.	Bimtek membatik dan pewarnaan di provinsi jambi dan Kabupaten Muaro Jambi (40 Oarang)	166.016.000	159.476.000	96,06	6.540.000	3,94
3.	Bimtek penumbuhan WUB perbengkelan roda 2 di Provinsi Jambi dan Bimtek Penumbuhan WUB service smartphone/Hp di Kabupaten Tebo (40 Orang)	234.685.000	234.353.000	99,86	332.000	0,14
4.	Fasilitasi perizinan usaha IKM pangan, kerajinan dan sandang, kimia dan bahan bangunan (110 Orang)	15.020.000	14.170.000	94,34	850.000	5,66
5.	Workshop E-Smart Ikm dan pendataan di Kabupaten Bungo (60 orang)	165.780.000	157.440.000	94,97	8.340.000	5,03
6.	Bimbingan dan sertifikasi halal (60 IKM)	157.321.000	147.531.000	93,78	9.790.000	6,22
7.	Pendampingan ke IKM batik di Kabupaten Bungo (10 Orang)	13.700.000	10.300.000	75,18	3.400.000	24,81
8.	Pelatihan pengolahan kopi di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin (40 Orang)	168.307.000	146.191.000	86,86	22.116.000	13,14
9.	Bimbingan teknis pembuatan aneka kerajinan dari pelapah pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (20 Orang)	101.848.000	94.085.000	92,34	7.763.000	7,62
10.	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	20.800.000	20.300.000	97,60	500.000	2,40
11.	Rakor penganggaran DIPa Tahun 2018 di labuan Bajo (NTT)	11.290.000	11.290.000	100	-	-
12.	Monitoring dan Evaluasi program kegiatan	33.048.000	33.048.000	100	-	-
13.	Pengelola sistem aplikasi emon kinerja dana dekonsentrasi kemenperin Tahun 2018	14.000.000	13.699.000	97,85	301.000	2,15
14.	Penyusunan laporan keuangan	29.802.000	29.146.500	97,80	655.500	2,20
15.	Rakor penyusunan program IKM Rahun 2019 dengan Kab/kota dan penandatanganan kontrak TPL program beasiswa Angkatan 2014 dan perpanjangan kontrak TPL angkatan 2013	95.193.000	94.567.000	99,34	626.000	0,66
16.	Partisipasi rakornas penyusunan program kegiatan Tahun 2019 di Lampung	14.950.000	14.580.000	97,52	370.000	2,47
17.	Penyusunan program penumbuhan dan pengembangan IKM Tahun Anggaran 2019	24.088.000	21.801.000	90,51	2.287.000	9,49
18.	Operasional TPL penerima beasiswa kementerian perindustrian angkatan 2013 dan 2014	319.940.000	313.260.000	97,81	6.680.000	2,09
19.	Operasional UPL Provinsi	39.960.000	35.485.000	88,80	4.475.000	11,20
20.	Operasional UPL Kabupaten Merangin	22.750.000	22.750.000	100	-	-
21.	Bimbingan penerapan GKM dan GMP oleh PFPP ke IKM Kab/kota	31.480.000	16.160.000	51,33	15.320.000	48,66
22.	Fasilitasi pelatohan pejabat fungsional penyuluh perindag (PFPP) di kendari	57.542.000	37.082.500	64,44	20.459.500	35,55
23.	Administrasi kegiatan	169.346.000	164.943.000	97,40	4.403.000	2,60
II	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.081.951.000	2.006.004.018	96,35	75.945.982	3,65
1	Program Peningkatan perdagangan dalam negeri	1.418.065.000	1.381.636.000	97,43	36.428.000	0,63
1.	Kegiatan Pasar Murah	135.560.000	135.530.000	99,76	330.000	0,24
	- Fassilitasi kegiatan pasar murah	135.560.000	135.530.000	99,76	330.000	0,24
2.	Kegiatan pangan nusa	92.690.000	90.009.500	97,11	2.680.500	2,89
	- Melaksanakan pameran pangan nusa	92.690.000	90.009.500	97,11	2.680.500	2,89
3.	Data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan abarang penting serta informasi Perdagangan Dalam Negeri (PDNI)	281.450.000	280.840.000	99,78	610.00	0,22
	- Pemantauan harga barang Bapok dan barang penting	186.810.000	186.375.000	99,77	435.000	0,23
	- Rapat koordinasi identifikasi pemantauan harga pokok	21.020.000	20.895.000	99,41	125.000	0,59
	- Pemantauan stok bapok dan barang penting	28.360.000	28.360.000	100	-	-

	- Forum komunikasi perpupukan provinsi	27.110.000	27.110.000	100	-	-
	- Pengawasan pemenuhan stok line III dan IV	18.150.000	18.100.000	99,72	50.000	0,28
24.	Kegiatan pemberdayaan konsumen di daerah	74.177.000	562.129.600	99,27	210.000	0,73
	- Pembentukan 2 kelompok konsumen cerdas SLTA	58.681.000	58.471.000	99,64	210.000	0,36
	- Penyelenggaraan aksi perlindungan konsumenn	15.496.000	15.496.000	1000	-	-
7.	Standarisasi dan pengendalian mutu	50.064.000	48.762.000	97,40	1.301.600	0,60
	- Pertemuan teknis jaringan pengendali mutu barang	9.568.000	9.134.300	95,47	433.700	4,53
	- Workshop pengendalian mutu barang	7.216.000	6.988.100	96,84	227.900	3,16
	- Analisis dan pemetaan potensi UTP dan wilayah provinsi	33.280.000	32.640.000	98,08	640.000	1,92
8.	Pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan	208.356.000	182.434.000	87,56	25.922.000	12,44
	- Pengawasan barang beredar dan jasa	131.226.000	111.335.000	84,84	19.891.000	15,16
	- Pengawasan kegiatan perdagangan	77.130.000	71.099.000	92,18	6.031.000	7,82
9.	Penyelenggaraan pasar lelang	400.000.000	398.586.050	99,65	1.413.950	0,35
	- Penyelenggara pasar lelang	285.656.000	285.495.800	99,94	160.200	0,06
	- Melaksanakan sosialisasi pasar lelang dan SRG`	66.344.000	65.090.250	98,11	1.253.750	1,89
	- Kajian komoditi unggulan daerah/desk research potensi	48.000.000	48.000.000	100	-	-
10.	Layanan internal	175.468.000	171.507.050	97,74	3.960.950	0,26
2.	Program peningkatan perdagangan luar negeri	663.886.000	624.368.018	94,05	39.517.982	5,95
1.	Penanganan permasalahan perdagangan luar negeri	68.972.000	61.919.000	89,77	7.053.000	10,23
	- Melakukan koordinasi pengelolaan ekspor dan impor daerah	68.972.000	61.919.000	89,77	7.053.000	10,23
2.	Penyebaran informasi hasil perundingan perdagangan internasional	143.214.000	133.332.100	93,10	9.881.900	6,90
	- Edukasi publik pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA)	143.214.000	133.332.100	93,10	9.881.900	6,90
3.	Dokumen terkait ekspor-impor di daerah yang ditetrtibkan	28.200.000	22.200.000	78,72	6.000.000	21,28
	- Melakukan penerbitan dokumen impor daerah	28.200.000	22.200.000	78,72	6.000.000	21,28
4.	Fasilitas promosi dan diklat kepada UKM	240.574.000	233.979.088	97,26	6.594.912	2,74
	- Memfasilitasi UKM dalam partisipasi pemeran dalam negeri	69.434.000	69.307.728	99,82	126.272	0,18
	- Melakukan pengembangan produk dan pelatihan ekspor	171.140.000	164.671.360	96,22	6.468.640	3,78
5.	Operasional dan pemeliharaan kantor	182.926.000	172.937.830	94,54	9.988.170	5,46

Sumber data: Sub bagian keuangan Disperindag Provinsi Jambi

BAB 4

Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Permasalahan dan Kendala
- 4.3. Rekomendasi

BAB IV PENUTUP

4.I. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Disperindag menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai Instansi yang bertugas membinakan dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan 🏆

TUJUAN 1 :

Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah, mendapat predikat nilai rata-rata Kategori Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melalui 4 (empat) Indikator, capaiannya ke 3 (tiga) Indikator kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator kategori baik,

- TUJUAN 2 : Meningkatkan Stabilitas dan Penguatan Pangsa Pasar yang Terintegrasi dengan Pasar Dalam Negeri, mendapat predikat nilai rata-rata Kategori Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) Indikator, capaiannya 2 (dua) Indikator sangat baik, dan 1 (satu) Indikator kategori rendah.
- TUJUAN 3 : Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas, mendapat predikat nilai rata-rata Kategori Sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melalui 2 (dua) Indikator, capaiannya 1 indikator kategori sangat baik dan 1 indikator kategori rendah;
- TUJUAN 4 : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha, mendapat predikat nilai rata-rata Kategori Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran yang diukur melalui 2 (dua) Indikator, capaiannya 2 (dua) Indikator di atas target.

4.2. Permasalahan dan Kendala

Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi di sektor industri dan perdagangan yang belum tercapai sesuai target antara lain 'Pertumbuhan Sektor Perdagangan'.

Disamping permasalahan tersebut sektor industri pengolahan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah klasik seperti :

1. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi Industri;
3. Penyelenggaraan fasilitas pengendalian dan pengawasan perindustrian belum optimal;
4. Penerapan standar isi produk, HKI dan sistem mutu masih kurang;
5. Daya saing produk rendah;

6. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasamanya industri belum optimal;
7. Penyelenggaraan fasilitas pengendalian dan pengawasan perindustrian belum optimal;
8. Kompetensi sumber daya manusia pengolahan industri yang rendah

Sedangkan persoalan yang terkait dengan perdagangan antara lain seperti :

1. Perdagangan bebas mengakibatkan membanjirnya barang-barang impor yang masuk dan produk dumping ke Indonesia khususnya Jawa Timur;
2. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian produk impor serta safeguard yang jarang digunakan;
3. Terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi yang representatif;
4. Pola pikir konsumen yang lebih cenderung ke produk impor;
5. Masih kurangnya diversifikasi tujuan ekspor;
6. Kurangnya ketersediaan akses data produk dan negara tujuan ekspor;
7. Stabilitas harga bahan pokok dan panjangnya rantai distribusi;
8. Infrastruktur sarana perhubungan antara daerah masih ada yang jelek;
9. Kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas

4.3. Rekomendasi

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Mendukung industri yang memberinya tambah komoditas utama yang potensial daerah melalui pendekatan kewilayahan.
2. Mendorong IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial serta promosi IKM secara berkelanjutan.
3. Penyediaan informasi pengolahan komoditas dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumber daya setempat.
4. Membuat standarisasi/SNI diberlakukan dengan ketat/law enforcement harus ditegakkan serta Perusahaan yang tingkat kandungan dalam negerinya tinggi harus diberi apresiasi/insentif;

5. Memacu pertumbuhan industri yang menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mencegah defisit neraca perdagangan serta bersinergi dengan semua stakeholders dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah untuk memproduksi agro.
6. Bersama dengan pemerintah Provinsi Jambi melakukan upaya untuk mengembangkan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta.
7. Mendorong integrasi aktifitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran pengusahaan produk dalam negeri.
8. Memperkuat rantai supply dan pasokan barang komoditas terutama bahan kebutuhan pokok.
9. Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah.
10. Mendorong berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dan persaingan usaha yang sehat

[! t h w l b Y l b 9 w w
5 l t 9 w l b 5 ! D t w h 1 W a . L t h b 5

Lampiran 1	RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI 2016-2021
------------	--

V i s i :		TerwujudnyaIndustri danPerdagangan yang Tangguh, Berkeadilan danBerdaya Saing									
M i s i :		1. MengembangkanS ektorIndustriBerkas Unggulan Daerah 2. MeningkatkanPerananP erdaganganDalam danLuarNegeri 3. MeningkatkanPelaksanaanTugasP okok danF ungsi danP elayananPublik DalamUrusanIndustri danperdagangan									
No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorKinerja		Kondisi Awal	Target KinerjaSasaran PadaTahunKe -					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkandayasaing industriguna mendukungperekonomi daerah	Tumbuh danBerkemban gnyaS ektorIndustri	1	Kontribusisektor industriterhadap PDRB (%)	11,05	11,50	11,60	10,80	10,90	11,00	11,10
			2	PertumbuhansektorIndustri (%)	2,33	5,00	5,20	2,71	3,13	3,55	3,97
			3.	Persentasepeningkatanusahaindust ri (%)	28.075 unit	5,00	5,20	5,02	5,22	5,42	5,62
			4	Persentasepeningkatantenagakerja industri (%)	111.390 orang	4,00	4,20	4,12	4,32	4,52	4,72
2.	Meningkatkanstabilitas hargadanpenguatanp angsa pasar yang terintegrasi denganpas ar dalamnegeri	Tumbuh danberkemban gnyaperdagangan dalamnegeri	1	Kontribusisektorperdagangan terhad ap PDRB (%)	11,12	11,50	11,65	12,55	12,60	12,65	13,10
			2	Pertumbuhansektorperdagangan (%)	11,02	11,50	11,60	6,37	6,55	6,80	7,00
			3	Persentasepeningkatanusahaperda ganan (%)	85.357 unit	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Meningkatkanperdag anganluarnegeri yang berkualitas	Meningkatnyaeksporda ran danterkendalinya i mpor	1	Persentase nilai ekspor non migas (%)	US \$ 930juta	10	10	6,14	6,28	6,42	6,56
			2	Persentase nilai impor (%)	US \$ 109 juta	5	5	5	5	5	5
4.	Meningkatkanpelayan an masyarakat dan duni a usaha	Meningkatnyakualitaski nerjapelayanan ekstern al dan internal organisasi	1	Persentase layanan administrasikan t layanan jasa yang sesua idengan SOP (%)	70%	75	80	85	90	95	100
			2	IndeksKepuasanMasyaraka tterhad apbeberapa pelayanan jasa (%)	74%	75	75,2	75,4	75,6	75,8	76

Lampiran2	INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
-----------	--

1. INSTANSI : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
2. VISI : Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Tangguh, Berkeadilan dan Berdaya Saing
3. MISI :
 1. Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah
 2. Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 3. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan
4. TUJUAN :
 1. Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah
 2. Meningkatkan stabilitas harga dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri
 3. Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas
 4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha
5. TUGAS :
Melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan
6. FUNGSI :
 1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum di bidang perindustrian dan perdagangan.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

[! t h w l b Y l b 9 w w
5 l t 9 w b 5 ! D t w h 1 W a . L t 1 5]

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHB}}{\text{Total Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$ <i>ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku</i>	BPS	Bid. IKK dan IMB
	Pertumbuhan sektor Industri	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun}(n) - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun}(n-1)}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun}(n-1)} \times 100\%$ PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHB : Atas Dasar Harga Konstan	BPS	Bid. IKK dan IMB
	Persentase peningkatan usaha industri	$\frac{\text{Jumlah Usaha Industri Tahun}(n) - \text{Jumlah Usaha Industri Tahun}(n-1)}{\text{Jumlah Usaha Industri Tahun}(n-1)} \times 100\%$	Hasil Pendaftaran	Bid. IKK dan IMB
	Persentase peningkatan tenaga kerja industri	$\frac{\text{Jumlah TK Industri Tahun}(n) - \text{Jumlah TK Industri Tahun}(n-1)}{\text{Jumlah TK Industri Tahun}(n-1)} \times 100\%$	Hasil Pendaftaran	Bid. IKK dan IMB
Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai Sektor Perdagangan PDRB ADHB}}{\text{Total Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$ <i>ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku</i>	BPS	Bid. PDN dan UPTD Metrologi
	Pertumbuhan sektor perdagangan	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun}(n) - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun}(n-1)}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun}(n-1)} \times 100\%$ PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK : Atas Dasar Harga Konstan	BPS	Bid. PDN dan UPTD Metrologi
	Persentase peningkatan usaha perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun}(n) - \text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun}(n-1)}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun}(n-1)} \times 100\%$	Hasil Pendaftaran	Bid. PDN dan UPTD Metrologi
Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor	Persentase nilai ekspor non migas	$\frac{\text{Nilai Ekspor Non Migas Tahun}(n) - \text{Nilai Ekspor Non Migas Tahun}(n-1)}{\text{Nilai Ekspor Non Migas Tahun}(n-1)} \times 100\%$	BPS	Bid. PLN dan UPTD BPSMB
	Persentase nilai impor	$\frac{\text{Nilai Impor Tahun}(n) - \text{Nilai Impor Tahun}(n-1)}{\text{Nilai Impor Tahun}(n-1)} \times 100\%$	BPS	Bid. PLN dan UPTD BPSMB

[! t h w l b Y l b 9 w w /
5 l t 9 w l b 5 ! D t w h 1 W a . L t h b 5]

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP	Target layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP Tahun (n) x 100% Realisasi layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP Tahun (n-1)	Laporan Kinerja	Sekretariat
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa	Rata-rata Skor IKM atas beberapa pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas Perindag Provinsi Jambi kepada pelaku usaha	Hasil Survey IKM	UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB

SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Tahun: 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,8 %
		Persentase pertumbuhan sektor industri	2,71 %
		Persentase peningkatan unit usaha industri	5,02 %
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	4,12 %
2	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,55 %
		Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	6,50 %
		Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar Rakyat dan Toko Modern)	7,50 %
3	Meningkatnya ekspor daerah dan kendalanya impor	Persentase nilai ekspor non migas	6,14 %
		Persentase penurunan nilai impor	5,0 %
4	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa	75,4 %



Program		Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.384.123.500,00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	1.320.618.045,00
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	194.400.000,00
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	58.130.000,00
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Rp	648.497.075,00
6. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp	865.320.000,00
7. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	2.661.814.000,00
8. Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp	734.557.060,00
9. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	861.900.000,00
10. Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	Rp	281.093.500,00
11. Pengembangan Industri Agro dan Kimia	Rp	2.593.019.820,00
12. Pengembangan Standarisasi Nasional	Rp	822.027.000,00
13. Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	Rp	179.500.000,00



SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
 Tahun : 2018

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get	Realisasi	%
1.	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	10,80 %	10,76 % *	99,6
		Pertumbuhan sektor industri (%)	2,71 %	3,02 % *	111
		Persentase peningkatan usaha industri (%)	5,02 %	4,12 %	82,1
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri (%)	4,12 %	5,02 %	82,1
2.	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	12,55 %	12,23 % *	97,45
		Pertumbuhan sektor perdagangan (%)	6,50 %	6,91 % *	94,1
		Persentase peningkatan usaha perdagangan (%)	7,0 %	6,98 %	99,71
3.	Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor	Persentase nilai ekspor non migas (%)	10,0 %	5,86 % **	58,6
		Persentase nilai impor (%)	5,0 %	19,52 % *	390,4
4.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	Persentase layanan administrasi kantoran layanan jasa yang sesuai dengan SOP (%)	75 %	75 %	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa (%)	75,0 %	74,67 %	99,56



54t9wb5! D twh' Wa . 1165

54t9wb5! D twh' Wa . 1165

SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

TAHUN: 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,5 %
		Pertumbuhan sektor industri	2,5 %
		Persentase peningkatan usaha industri	4,0 %
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	5,0 %
2	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,5 %
		Pertumbuhan sektor perdagangan	11,5 %
		Persentase peningkatan usaha perdagangan	7,0 %
3	Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor	Persentase kenaikan nilai ekspor	10,0 %
		Persentase penurunan nilai impor	5,0 %
4	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa	75,0 %



Lampiran8	PENGHARGAAN YANG DITERIMA SELAMA TAHUN2016
-----------	---

DisperindagProvinsi Jambi selakupembina Dewan Kerajinan Daerah Provinsi Jambi, selamatahun 2018mendapatpenghargaan/sertifikatanterlain :

1. Penghargaan dari Kementerian perindustrian Rebpublik Indonesia Tahun 2018 One Village One Product (OVOP) Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
2. Ace Award Tahun 2018.
3. Piagam Penghargaan Ketua Umum Dekranas kepada Dekranasda Provinsi Jambi yang telah hadir secara lengkap beserta 11 Ketua DEKRANASDA Kab/Kota pada Acara Rapat Kerja Nasional DEKRANAS Tahun 2016.
4. Piagam Penghargaan Terbaik diberikan kepada Dekranasda Provinsi Jambi untuk Katagori Desain Perhiasan Tradisional Indonesia dengan judul *`Set Perhiasan Raghanca_* pada Pameran Mutu Manikam Nusantara Indonesia Jewellery Fair 2016.
(sertifikat/penghargaan terlampir)



1 b Ylb9wW

5kt9wb5! DtwH' Wa . L165